



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BADAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA PROPINSI PAPUA)

HARMONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN
BANTUAN DONOR DI PAPUA

JUNI 2006



Kata Pengantar

Salam sejahtera untuk kita semua

Pemerintah, sektor swasta, lembaga non pemerintah serta komunitas donor telah mendukung pembangunan manusia di Papua. Namun demikian, tingkat keberhasilannya patut ditingkatkan. Campur tangan pemerintah dalam bidang pembangunan dirasa masih belum menyentuh mayoritas masyarakat terutama berkaitan dengan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) di Papua.

Pengembangan program pembangunan yang akan datang melalui pemerintah dan dukungan dari pihak luar atau donor memerlukan peningkatan pemahaman terhadap hikmah pembelajaran (*lessons learned*) dari kegiatan yang telah ada maupun yang direncanakan. Untuk itu diperlukan koordinasi yang erat antara para pihak yang berkepentingan dalam pembangunan di Papua termasuk donor dan pelaku lokal, diperlukan guna mendorong keselarasan kegiatan dan pemerataan hasil pembangunan secara efektif.

Dalam ruang lingkup kerangka pemikiran di atas, BP3D sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam membuat perencanaan dan pengendalian pembangunan melakukan pemetaan kegiatan lembaga-lembaga donor yang bekerja di Papua untuk menjamin adanya harmonisasi.

Selain dari itu, usaha memetakan lembaga donor ini adalah untuk menghindari adanya tumpang tindih baik dari jenis kegiatan maupun lokasi di mana kegiatan tersebut berada. Pembuatan booklet ini merupakan langkah awal yang dilakukan BP3D yang meliputi proses identifikasi lembaga-lembaga yang mempunyai kegiatan di Papua.

Hasil kompilasi dalam booklet diharapkan menjadi masukan bagi para pelaku pembangunan di Papua. BP3D akan secara teratur (paling tidak 3 bulan sekali) memperbaharui isi booklet secara terus menerus guna mendapatkan data paling akurat dan terkini.

Akhirnya secara khusus BP3D mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembangunan di Papua. Semoga kita bersama-sama dapat mewujudkan tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.

Jayapura, 28 Juli 2006



Drs. Martinus Howay
Kepala BP3D Propinsi Papua

Papua Development Program

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 01/06-2006

<p>Judul Proyek:</p> <p>Dukungan Terhadap Kesehatan Masyarakat di Jambi, Sumatera Selatan dan Papua, Indonesia (<i>Support to Community Health services in Jambi, South sumatera and Papua, Indonesia</i>)</p>	<p>Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email):</p> <p>SANIPLAN Hamburger Landstrabe 838, D-60437 Frankfurt PH. +49 (0) 69/9508210 FX. +49 (0) 69/95082199 E-mail : Frankfurt@saniplan.de. URL : www.saniplan.de</p> <p>Lembaga pelaksana di Papua: Unit Pengelolaan Lapangan : Jl. Kesehatan No. 2 Dok II Jayapura PH. +62 967 532 593 E-mail : schs_Papua@jayapura.wasantara.net.id Schs_papua@yahoo.com</p>
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana):</p> <p>Total biaya dari proyek diperkirakan mencapai 39,500,000 EUR (dari Jan'2003 s.d. 31 Dec'2008). Komitmen Komisi Eropa (European Commission atau EC) menetapkan jumlah maksimum 35,000,000 EUR sebagai hibah. Pemerintah Indonesia akan menghibahkan dan berkontribusi secara keuangan terhadap proyek senilai 4,500,000 EUR</p>	<p>Mitra penanggung jawab:</p> <p>Unit Pengelolaan Proyek di Jakarta : Gedung C Departemen Kesehatan Ruang 727 Jl. H.R Rasuna Sahid Blok X/5 Kav.4/9 Jakarta PH. +62 21 526 99 40 FX. +62 21 526 99 43 E-mail : s-chs@cbn.ne.id</p>

<p>Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):</p> <p>Memperbaiki status kesehatan dan nutrisi masyarakat terutama dalam kaitannya dengan masyarakat yang kekurangan dan mereka yang hidup dalam kondisi miskin, melalui pembangunan system kesehatan masyarakat di tingkat Kabupaten dan sub Kabupaten.</p> <p>Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Papua, Sumatera Selatan dan Jambi dengan penekanan khusus pada masyarakat berada pada tingkat kemiskinan yang tinggi.</p> <p>Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk membangun kapasitas Puskesmas, Pustus dan lain sebagainya untuk membuka akses terhadap layanan kesehatan.</p>	
<p>Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung: Kesehatan</p>	<p>Lokasi/ruang lingkup wilayah: Kabupaten Keerom and Merauke</p>
<p>Pola Pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan Puskesmas dan sub Puskesmas serta keterampilan dan kapasitas untuk merencanakan pengelolaan suatu sistem layanan kesehatan masyarakat terpadu yang berfokus pada kebutuhan pasien. b) Penetapan dan pelaksanaan standar kuantitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. c) Pengembangan kapasitas Kabupaten dan sistem untuk melaksanakan peran-peran baru dalam pembiayaan kesehatan (misalnya pembagian resiko dan peran lintas subsidi) memastikan kesinambungan, kesetaraan dan solidaritas dalam mencari dan menggunakan sumber daya kesehatan secara keseluruhan dengan penekanan khusus pada pembiayaan layanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. d) Peningkatan dan penguatan efektivitas penyeliaan/komunitas/kerja sama klien dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyampaian layanan masyarakat. 	
<p>Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pelatihan luas dalam perencanaan dan pengelolaan yang disediakan bagi karyawan puskesmas provinsi dan Kabupaten, pelatihan <i>on the job</i> bagi para dokter medis, juru rawat, teknisi laboratorium, penyuluh kesehatan, bidan bayi, pemimpin dan sukarelawan masyarakat. b) Pelbagai survey <i>baseline</i> (pendeskripsian kondisi awal) dilakukan di Kabupaten Keerom dan Merauke untuk mengakses status kesehatan dan nutrisi bagi masyarakat terpencil, pengetahuan, perilaku dan praktek masyarakat dari dua kabupaten tersebut. c) Pelaksanaan kajian kebutuhan, perbaikan dan renovasi dari posko layanan kesehatan dalam hal perlengkapan medis dan lainnya serta. Penyediaan perlengkapan, renovasi dan perbaikan direncanakan dikirim pada awal April 2006. 	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 02/06-2006

Judul Proyek: Pengontrolan secara ketat terhadap penyakit Malaria di empat provinsi di Kawasan Timur Indonesia (<i>Intensified Malaria Control in Four Provinces of Eastern Part Indonesia</i>)	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): Global Fund Malaria Papua Jln. Kesehatan 2 Dok II Jayapura Telp. (0967) 537724, Fax. (0967) 533814 Email. wimsgfpapua@yahoo.co.id
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): Global Fund bagi AIDs, TBC dan Malaria	Mitra penanggung jawab: Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Yapen, Waropen, Sorong, Sorong selatan, and Raja Ampat
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): a) Peningkatan kualitas manajemen program b) Peningkatan cakupan dan kualitas pemberantasan vektor c) Peningkatan pendataan penderita dan kualitas pengobatan	
Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung: Bidang Kesehatan khususnya malaria di wilayah wilayah tinggi, endemis dan daerah KLB Malaria	Lokasi/ruang lingkup wilayah: Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Yapen, Waropen, Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat.

Pola Pelaksanaan:

- a) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program serta melakukan penelitian untuk mendukung pelaksanaan pemberantasan malaria
- b) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi, LSM, organisasi keagamaan dalam upaya pemberantasan malaria
- c) Penyemprotan rumah
- d) Penggunaan kelambu berinsektisida
- e) Penyuluhan kesehatan untuk merubah perilaku masyarakat
- f) Penemuan penderita secara dini dan melakukan pengobatan yang tepat dengan obat anti malaria yang efektif
- g) Penggunaan metode standar untuk melaksanakan pemberantasan malaria

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

- a) Pelatihan TOT pemberantasan vektor bagi petugas provinsi dan kabupaten
- b) Pelatihan petugas penyemprot puskesmas di kabupaten Biak, Serui dan Sorong
- c) Penyemprotan rumah dengan insektisida di Biak, Serui and Sorong
- d) Pendistribusian kelambu berinsektisida bagi ibu hamil, balita, dan keluarga miskin di Biak, Serui and Sorong
- e) Pelatihan dokter dan paramedis puskesmas, puskesmas pembantu, dan bidan desa dalam penanganan kasus malaria di Biak, Serui dan Sorong
- f) Sosialisasi Penggunaan ACT untuk pengobatan malaria bagi dokter puskesmas dan rumahsakit di Biak, Serui dan Sorong
- g) Sosialisasi penggunaan ACT untuk pengobatan malaria bagi dokter TNI di Jayapura
- h) Melakukan survey massal sampel darah di desa endemis malaria tinggi di Biak, Serui dan Sorong
- i) Melakukan perawatan massal demam di desa endemis malaria tinggi di Biak, Serui dan Sorong
- j) Melakukan pengobatan malaria tropika (*falciparum*) dengan ACT (Radical treatment)
- k) Pelatihan petugas mikroskopis malaria puskesmas dan rumah sakit
- l) Pelatihan kader malaria desa di desa yang jauh dari pelayanan kesehatan
- m) Pembentukan pos malaria desa di desa yang jauh dari pelayanan kesehatan
- n) Melakukan pengecekan ulang hasil pemeriksaan sampel darah malaria puskesmas di kabupaten dan provinsi

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 03/06-2006

<p>Judul Proyek:</p> <p>Pengurangan Kemiskinan dan Mempromosikan Kedamaian dan Pembangunan di antara Masyarakat Asli di Papua (<i>Reducing Poverty and Promoting Peace and Development among Indigenous People in Papua, Indonesia</i>)</p>	<p>Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email):</p> <p>ILO (dengan perwakilan-perwakilan PBB lainnya) dan mitra perwakilan pemerintah dalam Panitia Penasihat Nasional dan Panitia Pengarah Proyek Provinsi – BP3D (sebagai Ketua), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, BKPM, Apindo dan SPSI.</p> <p>Organisasi-organisasi masyarakat asli dalam lokasi proyek percontohan dengan bantuan unit-unit pemerintah daerah dan LSM sebagai mitra di Provinsi Papua.</p> <p>Perwakilan-perwakilan mitra dan LSM-LSM yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan khusus.</p>
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana):</p> <p>+/- 1,5 juta USD (2006-2008); ILO dan UNTFHS (Pemerintah Jepang)</p>	<p>Mitra penanggung jawab:</p> <p>Departemen Tenaga Kerja</p>
<p>Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):</p> <p>Pengurangan kemiskinan dan mempromosikan rasa aman dan pembangunan di Papua, Indonesia adalah salah satu proyek percontohan selama tiga tahun yang mana dimaksudkan untuk menguji pendekatan-pendekatan keterlibatan masyarakat melalui pola kemandirian (<i>community driven</i>) untuk mengurangi kemiskinan di antara masyarakat asli dan proses-proses kemandirian para pemangku kepentingan bagi penguatan mekanisme pembangunan dan kedamaian di Papua dalam konteks dan dalam kerangka kerja Undang-Undang Otsus.</p> <p>Proyek memiliki tiga komponen dan tujuan-tujuan yang saling berkaitan yakni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengurangan kemiskinan di antara masyarakat asli2) Mempromosikan kesetaraan gender3) Memperkuat mekanisme pembangunan dan kedamaian <p>Misi dari proyek adalah untuk memfasilitasi proses-proses yang dapat memperkuat kemampuan perwakilan mitra-mitra untuk dapat meninjau dan meningkatkan keberadaan mekanisme pembangunan dan rasa aman di Papua dan dapat mengambil</p>	

inisiatif untuk menciptakan suatu bentuk baru jika perlu. Semua kegiatan ini diharapkan untuk menjadi sensitif jender dengan suatu pandangan yang turut mempromosikan wanita dalam proses pembangunan. Perluasan proyek akan dirumuskan berdasarkan hasil-hasil dan manfaat-manfaat yang ditemukan dalam pilot proyek ini.

Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung:

Sektor tenaga kerja

Lokasi/ruang lingkup wilayah:

Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, kecamatan Kentik Gresi di Kabupaten Jayapura, Kecamatan Kebar dan Tanah Rubuh di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua.

Pola Pelaksanaan:

- a) Organisasi masyarakat asli dalam lokasi proyek tersebut akan mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengurangan kemiskinan sensitif jender oleh mereka sendiri berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan dan keberadaan sumber daya setempat yang tersedia. Perwakilan pemerintah daerah yang peduli dan ILO akan menyediakan fasilitas bantuan dalam bentuk infrastruktur sosial dan fisik, pengetahuan teknis tambahan dan bantuan hibah kecil.
- b) Para perwakilan daerah terkait seperti BP3D, Disnaker, Dinas sosial dan lain sebagainya serta LSM pendukung; mengkoordinasikan identifikasi, perencanaan dan pelaksanaan dari kegiatan sensitif jender dan penguatan mekanisme pembangunan dan kedamaian. Untuk kegiatan tersebut, ILO dan PPC akan menyediakan layanan-layanan dalam bentuk infrastruktur sosial dasar, pengetahuan teknis dan bantuan hibah kecil.
- c) PSC akan meninjau dan mengusulkan perbaikan bagi rencana kerja tahunan secara keseluruhan dan juga perencanaan pembangunan masyarakat terkait dengan proyek tersebut. PSC juga akan membantu memonitor dan mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut. Sebagai pengelola keuangan dari bantuan proyek tersebut, ILO akan melakukan pembayaran langsung dalam kaitannya dengan biaya kegiatan dan jasa yang timbul.
- d) Unit-unit pemerintah daerah pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, didorong untuk menyediakan sumber daya pendampingan yang berasal dari Otsus bagi proyek tersebut, agar dapat mengembangkan jangkauannya dengan nilai penerima manfaat (*beneficiary*) secara langsung.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

- a) Proyek ini disetujui oleh Bappenas dan termuat dalam suatu MOU antara Pemerintah Papua dan ILO, sedang berjalan. Pertemuan orientasi proyek dengan perwakilan-perwakilan mitra sudah dilaksanakan. Dengan tujuan untuk merancang secara sistematis pemberian dukungan dari perwakilan-perwakilan mitra, NPAC dan PPSC yang sudah diorganisir.
- b) Pertemuan-pertemuan orientasi proyek di tingkat masyarakat lapisan bawah telah dilaksanakan di Kecamatan Muara Tami dan Kecamatan Kentuk Gresi. Suatu pertemuan orientasi serupa juga dilaksanakan di Kabupaten Manokwari.
- c) Sudah melibatkan 4 organisasi masyarakat di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Manokwari.
- d) Umpan balik awal yang diberikan telah mengindikasikan bahwa sebagian besar perwakilan mitra dan juga tokoh-tokoh masyarakat asli beserta anggotanya "menyambut" pendekatan pola kemandirian (*community driven*) dengan antusias dan bersedia mendukung dan berpartisipasi dalam proses tersebut.

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 04/06-2006

Judul Proyek: Program layanan kesehatan dasar dengan fokus khusus pada pencegahan HIV/AIDs dan penularan penyakit seksual lainnya di Distrik Mulia dan Sinak di Kabupaten Puncak Jaya (<i>Primary health care program with special focus on prevention of HIV/AIDs dan other sexually infection transmission in sub-district Mulia dan Sinak Kabupaten Puncak Jaya</i>)	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): Mèdecins Du Monde (MdM) Jl. Encik SD Tompo No. 2 Angkasapura – Jayapura Telp: 0967-531839, Fax : 0967-534282 Email : mdmpapua3@yahoo.com
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana): 677.000 € (2006-2008); dana dari MdM 177.000 € (Maret 2006 – Februari 2007); Cordaid setuju untuk mendanai sebagian dari anggaran dengan lembaga donor lainnya.	Mitra penanggung jawab: Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten Puncak Jaya serta
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): Tujuan umum adalah untuk memperbaiki status kesehatan penduduk di distrik Mulia dan Sinak dalam kurun waktu tiga tahun (populasi 64000). Terdapat dua tujuan khusus, yakni: <ol style="list-style-type: none">1. Memperbaiki akses penduduk terhadap layanan utama kesehatan2. Memperbaiki akses terhadap layanan pencegahan penyakit menular, dengan layanan kesehatan berbasis komunitas. Aktivitas meliputi khususnya pelatihan baik bagi karyawan medis dan para medis, memberdayakan karyawan Puskesmas dalam pengelolaan persediaan melalui penyaluran fasilitas kesehatan publik dengan persediaan awal obat-obatan yang siap dikonsumsi, aksi pencegahan bagi masyarakat Dani dengan menggunakan bahan-bahan IEC yang diterima dari fase pertama proyek MdM dan berkoordinasi dengan mitra lokal seperti PKBI dan Yayasan Kesehatan Bethesda.	
Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung: Kesehatan dan HIV/AIDs	Lokasi/ruang lingkup wilayah: Dua distrik di kabupaten Puncak Jaya; distrik Mulia dan distrik Sinak

Pola Pelaksanaan:

Tim pelaksana proyek terdiri atas sebagian besar penduduk setempat dan tenaga asing. Komposisi tim terdiri atas dua tenaga asing (koordinator medis dan seorang juru rawat sebagai petugas yang menangani pencegahan) dan 12 anggota penduduk lokal (Jayapura dan Mulia). Salah satu tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal, terutama para juru rawat yang berasal dari masyarakat Dani di Mulia. Sejauh ini kami memiliki hubungan yang erat dengan Dinas Kesehatan dan KPAD baik di Jayapura dan Mulia. Kami juga bekerja sama dengan LSM setempat, misalnya PKBI, YKB dan gereja setempat. Selama proyek tiga tahun ini, rencana kegiatan tahunan ditinjau setiap tahun berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh proyek. MdM memiliki hubungan tersendiri dengan tim evaluasi; Coraid memiliki laporan dan akan membuat laporan berdasarkan laporan dan evaluasi internal. Pada saat ini kami mencari dukungan dana dari European Union.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Kami belajar banyak dari fase pertama di Kabupaten Puncak Jaya selama 18 bulan dari program STI dan pencegahan HIV/AIDs di distrik Mulia. Jaringan (networking) berperan penting di wilayah ini. Setahun yang lalu, tidak ada satu pun organisasi yang bekerja di Puncak Jaya dalam bidang STI dan pencegahan HIV/AIDs. Pada saat ini kami memiliki tiga mitra kerja: IHPCP, PKBI dan YKB. Bekerja sama dengan KPA Kabupaten Jaya merupakan hal penting karena mereka adalah koordinator setempat. Terdapat pelbagai pihak lain yang patut ditingkatkan baik di distrik Mulia dan Sinak. Dokter medis harus ditunjuk di Sinak, karena sampai saat ini tidak ada dokter yang bekerja di distrik di Puncak Jaya (di Puskesmas) terkecuali distrik Mulia. Keterlibatan Bupati, Sekda dan otoritas di Kabupaten Puncak Jaya sangat penting. Diperlukan adanya pengawasan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Kami bekerja erat dengan gereja oleh karena masyarakat sangat terlibat dengan kegiatan gereja dan gereja juga memiliki jaringan yang baik.



Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar

Lembar Informasi Proyek LIP 05/06-2006

Judul Proyek: NLR-Komponen Lepra- Provinsi Papua (<i>NLR-Leprosy Component Papua Province</i>)	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): Organisasi: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Alamat : Jl Kesehatan No. 2 Dok II - Jayapura Telepon/Fax : (0967) 536818 E-mail : nlrpapua@yahoo.com
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggand dana): Tahun 2005: Rp.792.487.750,00 Tahun 2006: Rp. 803,477,200,00	Mitra penanggung jawab: Dinas Kesehatan Provinsi Papua
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): a) Mulai : April 2004, Berakhir: tahun 2010 b) Mengurangi tingkat sakit dan cacat dari lepra melalui pemutusan rantai penularan penyakit. c) Penemuan kasus dan perawatan di pusat kesehatan. d) Karantina kasus pasien lepra di pusat kesehatan. e) Pelatihan bagi: dokter, para medis dan teknisi laboratorium di pusat kesehatan. f) Pertemuan setiap semester dengan Kepala pusat kesehatan dan ahli kesehatan di Kabupaten, serta Pertemuan setiap semester dengan Kabupaten TB and Leprosy Wasor di Provinsi. g) Kunjungan pengawasan dari provinsi ke kabupaten dan kabupaten ke pusat kesehatan setiap triwulan. h) Pendekatan berbasis masyarakat (Rapid Village Survey), menghubungi survey/ pemeriksaan.	
Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung: Kesehatan – Lepra	Lokasi/ruang lingkup wilayah: Kabupaten: Merauke, Jayapura, Fakfak, Manokwari, Nabire, Mimika, Kerom, Mappi, Boven Digoel, Biak Numfor, Sorong, Sorong Selatan, Yapen Waropen, Paniai, Jayawijaya, Yahukimo, Asmat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Raja Empat dan Sarmi Kota : Kota Sorong dan Kota Jayapura

Pola Pelaksanaan:	
<ul style="list-style-type: none"> a) Pendanaan bagi penderita lepra terutama didukung oleh NLR (Netherlands Leprosy Relief), dan memerlukan komitmen yang lebih banyak dari anggaran setempat. b) Karyawan HCs dan pengawas Kabupaten. c) Ketersediaan obat lepra secara gratis. d) Petunjuk nasional. e) Sistem pengawasan dan jaringan. f) Komitmen provinsi dan kabupaten guna memerangi kombinasi lepra dan TB. 	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:	
<ul style="list-style-type: none"> a) Kelompok perawatan mandiri di Biak (rehabilitasi dilakukan oleh para penderita itu sendiri). b) Beberapa kegiatan yang telah dikombinasikan dengan TB-Lepra 	

NB: informasi tambahan selanjutnya:


- 1) Evaluasi triwulan dilakukan di tiap kabupaten.
- 2) Laporan triwulan Kabupaten menggunakan model kelompok.
- 3) Laporan triwulan provinsi kepada NTP menggunakan model kelompok.

Program Pembangunan Papua



Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar

Lembar Informasi Proyek LIP 06/06-2006

<p>Nama Proyek: Bantuan Kesehatan Masyarakat bagi Masyarakat yang terkena dan beresiko gempa bumi di Nabire—Papua.</p> <p>Bantuan yang sedang berlangsung: Februari-November 2006, dinamakan juga Tahap III, didanai oleh <i>Humanitarian Aid Department of the European Commission (ECHO)</i>—Bantuan Kemanusiaan Uni Eropa.</p> <p>Tahap II (Maret-November 2005) Tahap I (Desember 2004-Februari 2005)</p> <p><i>Assessment di Yahukimo (Wamena) dilakukan menanggapi masalah makanan dan nutrisi (diusulkan bantuan).</i></p>	<p>Organisasi Pelaksana (alamat, telepon, fax, email):</p> <p> Oxfam</p> <p>Oxfam GB – Nabire-Papua, Jln. Beringin, Kelurahan Nabarua, Nabire 988 16, Papua, Indonesia. Phone: (0984) 232 74 Fax: (0984) 26173 Mobile: 0811 487 702 Email: Gjethwa@oxfam.org.uk</p>
<p>Penyandang dana (budget dan badan penyandang dana):</p> <p><u>Penyandang dana: Oxfam GB and ECHO:</u></p> <p>– EURO 408.711 (Rp 4.635.594.811), Februari-November 2006.</p> <p><u>Penyandang Dana: Oxfam GB:</u></p> <p>Tahap II – GBP 92,925 (Rp 1,421,089,734). Tahap I – GBP 38,933 (Rp 661,151,600)</p>	<p>Organisasi Pelaksana (Mitra pemerintah):</p> <p>Oxfam GB bersama dengan Primari (Prakarsa Bagi Masyarakat Mandiri), LSM local.</p>

Uraian gambaran proyek (tujuan dan kegiatan):

Pada bulan November 2004, gempa bumi menghantam Nabire, Papua untuk kedua kalinya dalam setahun itu. Gempa bumi kedua dan terakhir ini terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2004 dengan kekuatan 6,4 skala Richter.

Dengan adanya kebutuhan mendesak yang belum tertangani pada bidang kesehatan masyarakat dan tempat tinggal, Oxfam memberikan bantuan tanggap darurat pada masyarakat yang terkena bencana tersebut dengan tujuan **untuk benar-benar mengurangi resiko air dan sarana sanitasi yang berkaitan dengan penyakit pada kaum wanita dan pria yang terkena bencana gempa bumi di Kabupaten Nabire, Papua.**

Kegiatan berikut ini dilakukan dengan tujuan:

Tahap I

- Pendistribusian paket bahan-bahan yang diperlukan untuk tempat tinggal dan rumah untuk 2,108 keluarga.
(Plastik lembaran, terpal, kelambu dan jerigen).

Tahap II

- Pendistribusian bahan-bahan bangunan rumah seperti seng lembaran, semen dan paku untuk 508 keluarga.
- Pembangunan 9 sumur baru dan perbaikan 1 sumur tua untuk air konsumsi.
- Pembangunan mata air dan sistem perpipaan di dua desa untuk air konsumsi.
- Pembuatan 24 Saringan Pasir Cepat—sistem penjernih air untuk air konsumsi yang jernih, bersih dan sehat.
- Pembangunan 150 WC umum untuk kondisi yang lebih bersih dan sehat.
- Pelatihan kader untuk meningkatkan kondisi bersih dan sehat.
- Mengadakan acara-acara promosi hidup bersih-sehat yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dilatih.

Tahap III (bantuan yang sedang berjalan, Juni 2006)

- Pembangunan 30 sumur baru untuk air konsumsi.
- Pembuatan 100 Saringan Pasir Cepat—sistem penjernih air untuk air konsumsi yang jernih, bersih dan sehat.
- Pembangunan 400 WC umum untuk kondisi yang lebih bersih dan sehat.
- Pelatihan kader untuk meningkatkan kondisi bersih dan sehat.
- Mengadakan acara-acara promosi hidup bersih-sehat yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dilatih.

Fokus bidang bantuan:

Bantuan ini memfokuskan pada bidang:

- Air
- Sarana Sanitasi
- Kesehatan Masyarakat-- Promosi Hidup bersih-sehat

Jender dan keberagaman merupakan hal yang saling terjalin dalam semua kegiatan/bidang bantuan Oxfam.

Cakupan lokasi /geografis:

1) Kabupaten Nabire, Papua.

Kecamatan/Distrik: Wanggar dan Nabire.
Oxfam berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat selama perencanaan dan pelaksanaan bantuan.

Oxfam menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi antar LSM pada tanggal 23 Mei 2006 untuk saling berbagi informasi program dan membicarakan strategi koordinasi di masa mendatang.

Oxfam menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi antar pemerintah dan LSM pada tanggal 24 Mei 2006 untuk berbagi informasi bantuan (yang didanai oleh ECHO) dan untuk membicarakan strategi berkoordinasi.

Pelaksanaan:

Tahap I dan II dilaksanakan langsung oleh Oxfam berkoordinasi dengan badan pemerintah dan LSM setempat. Pada tahap bantuan yang sedang dijalankan, Oxfam melaksanakan bantuan tersebut melalui organisasi mitra, Primari. Juga bekerja sama dan koordinasi dengan pemerintah, UN dan LSM setempat lainnya.

Untuk bantuan yang sedang berjalan (Februari—November 2006), yang juga disebut Tahap III, Oxfam meninjau lagi 25 desa untuk menentukan lokasi sasaran. Oxfam dan tim mitra mengidentifikasi 7 desa untuk pemberian bantuan air, sarana sanitasi dan kesehatan. Berikut ini informasi singkat mengenai bantuan yang sedang dijalankan:

No.	Deskripsi Kegiatan	Rincian
1	Tanggal kegiatan dimulai	15 Februari 2006
2	Rencana Tanggal kegiatan selesai	14 November 2006 (kemungkinan selesai pada tanggal 31 Desember 2006)
3	Lama Kegiatan	9 bulan
4	Total dana bantuan ECHO untuk Intervensi Tahap III	Rp. 4.600.000.000,00
5	Rencana jumlah desa yang dibantu	6--10 lokasi/desa
6	Rencana jumlah Pengguna/Penerima	12.000 jiwa (14.469 jiwa)
7	Jumlah staf sampai sekarang	16 (termasuk 2 staf internasional)
8	Rencana Kegiatan utama: <ul style="list-style-type: none">- Pembuatan sumur baru dan perbaikan untuk air minum.- Pembuatan 100 Saringan Pasir Cepat (Sistem Penjernih air) untuk air minum sehat dan higienis.- Pembangunan 400 WC/jamban masyarakat untuk kondisi kesehatan yang lebih baik.- Pelatihan Kader Promosi Higiene untuk peningkatan perilaku hygiene di dalam masyarakat dan pembentukan Panitia Air Sarana Sanitasi untuk merawat sarana air dan sanitasi.- Sesi penyuluhan kesehatan/ promosi perilaku hygiene yang baik kepada masyarakat oleh kader promosi hygiene/anggota panitia sarana air dan sanitasi terlatih.- Perlombaan penulisan Esai dan Menggambar di sekolah-sekolah- Kompetisi foto yang dilakukan oleh anggota masyarakat	

Kisah keberhasilan dan hasil pembelajaran:

Oxfam menyadari bahwa kebutuhan air, sarana sanitasi, kesehatan dan promosi hidup bersih-sehat sangat dibutuhkan di daerah yang terkena gempa di Nabire. Oleh sebab itu, setelah menyelesaikan bantuan tahap I dan II, Oxfam mengajukan usulan program bantuan tahap III. Desa-desa yang terkena bencana membutuhkan banyak bantuan dana dan teknis juga bantuan dari pemerintah dan badan lainnya. Oxfam juga menyadari bahwa jender merupakan permasalahan. Namun demikian, dengan kesempatan yang ada, kaum perempuan telah dapat memainkan peranan penting dalam kelompok kerja di tingkat desa. Ada pula hambatan prasarana yang mengakibatkan tertundanya bantuan seperti jalan yang buruk. Akhirnya, pembangunan kapasitas lokal dalam artian kesiapan menanggulangi bencana merupakan satu hal penting yang dapat diperkuat dengan aksi bersama.

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 07/06-2006

<p>Judul Proyek:</p> <p>Program Pembangunan Papua (Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan Pembangunan Manusia/Tujuan Pembangunan Millenium)</p>	<p>Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email):</p> <p>Papua Development Advisory Board (PDAB) sebagai Badan Penasihat (Kantor BPID, Jl. Sam Ratulangi No. 32, Jayapura 99112), Telp: 0967-521556-58, fax: 521541;</p> <p>BP3D sebagai mitra koordinasi di tingkat provinsi; dan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPMD, Bawasda serta lembaga keagamaan/LSM sebagai mitra pelaksana.</p>
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana):</p> <p>± 25 USD (2006-2010), UNDP dan beberapa negara donor</p>	<p>Mitra penanggung jawab:</p> <p>BAPPENAS bermitra dengan UNDP (dan lembaga PBB lainnya)</p>
<p>Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):</p> <p>Program ini mendukung untuk pembangunan kapasitas pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang diformulasikan berdasarkan pada kajian kebutuhan yang dilakukan para pelbagai pemangku kepentingan yang berfokus terhadap pemerintah lokal dan prioritas masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan peri kehidupan masyarakat. Program Pembangunan Papua menetapkan suatu strktur, yang mana di para pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dalam memperkuat kapasitas lokal yang bersifat strategis dan penting bagi Papua yaitu:</p>	

- 1) Kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin, pendataan dan perencanaan operasional;
- 2) Peragaan pendekatan lokal yang efektif dalam pembangunan manusia dan penyaluran pelayanan kebutuhan dasar;
- 3) Pemantauan dan evaluasi program pembangunan manusia; serta
- 4) Koordinasi program pembangunan manusia dan harmonisasi dukungan donor.

Program Pembangunan Papua meliputi serangkaian aktivitas yang berada dalam ruang lingkup empat komponen di atas yang mendukung tujuan pembangunan kapasitas bagi lembaga-lembaga pelaksana setempat berkaitan dengan MDGs. Program ini memiliki nilai tambah terhadap inisiatif yang direncanakan maupun yang ada, dengan memperbaiki koordinasi, menciptakan kesempatan bagi pembelajaran lintas pihak, kemitraan dan pembentukan kepercayaan. Program ini dimaksudkan sebagai suatu program dukungan lima tahun, dan melalui program ini pula akan dibangun program bantuan lanjutan yang lebih efektif dan berkesinambungan di wilayah Papua.

Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung:

Program berfokus pada pembangunan kapasitas para pihak baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat sipil, serta berfokus pula pada MDG seperti kesehatan, pendidikan, peri kehidupan, jender dan lingkungan hidup.

Lokasi/ruang lingkup wilayah:

Dua distrik di masing-masing delapan Kabupaten yang akan diseleksi oleh PDAB di Kabupaten Sarmi, Yapen, Jayawijaya, Yahukimo, Boven Digoel, Mimika, Fak-fak, Raja Ampat

Pola Pelaksanaan:

Seorang penasihat bagi setiap komponen akan membantu lembaga kunci dari pemerintah dan masyarakat sipil, dalam memprogramkan rancangan aktivitas/intervensi untuk mencapai tujuan program; BP3D mengkoordinasikan proses pemrograman tersebut dan memantau perkembangan pelaksanaan; rencana kerja tahunan untuk disetujui oleh PDAB; PDAB aktif berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi dari pencapaian program; UNDP berperan sebagai manajer keuangan dari trust fund, melakukan pembayaran langsung kepada vendors; Pemerintah Kabupaten didorong untuk mengalokasikan sumber daya OTSUS; program diharapkan berkembang luas (setelah satu atau dua tahun) ketika provinsi dan kabupaten menyediakan lebih banyak sumber daya OTSUS yang lebih tersedia dan atau ketika donor menyediakan pendanaan tambahan.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Program ini dijadwalkan mulai pada tanggal 1 April 2006; program telah disetujui oleh Bapenas (12 Januari 2006). Saat ini program dalam periode pendahuluan dan selama periode tersebut menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada BP3D Provinsi dalam mempersiapkan RPJP (berdasarkan hasil Sintesis dari Papua Needs Assessment) serta menyediakan pendampingan bagi Bappeda Kabupaten (Merauke, Boven Digoel, Mimika, Pengunungan Bintang, Sarmi, Keerom, Waropen and Fak-Fak) dalam mempersiapkan RPJM Renstra sektoral serta dalam membangun penguatan Distrik/strategi desentralisasi fiskal.

Hikmah pengalaman yang dipetik dari *Papua Needs Assessment* diantaranya yakni adanya berbagai kebutuhan untuk dukungan pendampingan jangka lebih panjang yang lebih berkesinambungan, membangun berdasarkan pendekatan-pendekatan sukses sebelumnya, menerapkan pendekatan yang mengurangi ketergantungan dan membangun kapasitas yang berkesinambungan, membangun kemitraan antara pemerintah lokal dan organisasi masyarakat sipil, terutama lembaga agama yang memiliki jaringan luas serta kapasitas untuk mendukung komunitas.

NB: informasi selanjutnya dapat diperoleh dari website: www.undp.or.id/papua

Program Pembangunan Papua



Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar

Lembar Informasi Proyek
LIP 08/06-2006

<p>Judul Proyek :</p> <p>Dukungan untuk Mengarusutamakan Gender ke dalam Kebijakan dan Program Pembangunan</p>	<p>Instansi Pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan e-mail):</p> <p>Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Perempuan (BAPEMPER) Provinsi Papua, Dan Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Kabupaten Jayapura</p> <p>Sekretariat Proyek Provinsi bertempat di:</p> <p>Kantor UNDP Papua, Kantor BPID, Lt.II, Jl. Sam Ratulangi No.32 Jayapura 99112. Telp. +62-967-521556,521558 Fax. + 62-967-521541 Email : annabr_smg@yahoo.com</p>
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana) :</p> <p>Diperkirakan US\$ 962,945. (UNDP US\$ 800,000, dana sisanya akan diperoleh dari donor lainnya)</p>	<p>Mitra Penanggung Jawab:</p> <p>Badan Pemberdayaan Perempuan (BAPEMPER) Provinsi Papua dan Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Kabupaten Jayapura.</p> <p>Bekerja sama dengan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif serta masyarakat sipil.</p>

Deskripsi Naratif dari Proyek (Tujuan dan Aktivitas) :

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan Tata Pengaturan Pemertintahan yang Demokratis di Indonesia melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) atau integrasi perspektif gender dalam proses-proses pembangunan, yakni perencanaan hingga evaluasi dan ikut menyumbang pada penganggulangan kemiskinan.

Juga bertujuan untuk mendukung BAPEMPER dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dan kerangka kebijakan untuk mempromosikan PUG kepada pemerintah maupun mitranya.

Instansi penanggung jawab program, yaitu BAPEMPER dan KPP bertanggung jawab terhadap implementasi program dalam rangka membangun 3 komponen, yaitu : 1) Membangun kapasitas pemerintah dan legislative dalam pembuatan kebijakan dan program dan advokasi untuk integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan program pembangunan. 2) Memberikan dukungan bagi pemangku kepentingan untuk mengarusutamakan gender dalam kebijakan dan program pembangunan. 3) Mengembangkan kerangka kebijakan nasional untuk PUG.

Program dimulai dari penentuan isu fokus, berdasarkan rekomendasi dari stakeholder, yaitu intervensi program pemberantasan buta aksara, (Keaksaraan Fungsional dan Paket A, B dan C) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, dengan perspektif gender.

Ruang lingkup focus/sector yang didukung :

Proyek ini memiliki 3 komponen :

- 1) Pengembangan kapasitas, berupa dukungan teknis dan advokasi untuk PUG.
- 2) Pelatihan Ketrampilan Terapan dalam Mengarusutamakan Gender dalam Perencanaan, Kebijakan dan Program.
- 3) Mengembangkan Kerangka Kebijakan Nasional dalam hal ini INPRES no. 9 tahun 2000 dan mendukung penyusunan strategi PUG secara nasional.

Lokasi/Ruang Lingkup Wilayah :

- 1) Provinsi Papua
- 2) Kabupaten Jayapura

Pola Pelaksanaan :

Staf proyek dengan koordinasi dengan BAPEMPER, melakukan sosialisasi keberadaan proyek.

Kemudian melakukan pengumpulan data/ assessment awal mengenai keberadaan dimensi gender dalam dokumen dan proses kebijakan maupun program sektor terpilih dan pengumpulan data terpilih.

Hasil kajian ini menjadi “titik masuk” proses intervensi untuk memasukkan dimensi gender dalam dokumen dan proses perencanaan daerah (RPJP, RPJM, dan RKPD 2007), Dokumen SKPD, Program Sektor Terpilih, melibatkan pemerintah (BAPPEDA, BPS, BAPEMPER dan Dinas DIKJAR, serta NGO).

Berdasarkan hasil kajian ini pula dilakukan kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan BAPEMPER dan KPP sebagai leading sector dalam proses PUG/integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan program pemerintah di sektor pemerintah serta pemahaman isu gender di tataran masyarakat.

Di komponen ketiga, yakni Kajian implementasi INPRES no. 9 Tahun 2000, dilakukan Participatory Self Assessment di tingkat nasional dan daerah telah menghasilkan beberapa dokumen hasil kajian serta bahan/materi untuk penyusunan Rencana Aksi Nasional PUG yang akan dikembangkan sebagai bagian dari strategi nasional untuk implementasi PUG.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan :

Implementasi strategi PUG membutuhkan komitmen akan proses yang konsisten.

Proses yang konsisten ini termasuk keterbukaan dari semua pihak untuk mulai menganalisis jalannya proses pembangunan yang dilakukan selama ini, dari perspektif gender.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian penting dalam analisis ini adalah adanya data kualitatif dan kuantitatif yang terpilih berdasarkan jenis kelamin, sehingga memunculkan profil ada tidaknya kesenjangan/ketimpangan/gender dalam beberapa bentuk yaitu, marjinalisasi, subordinasi, Stereotipe, kekerasan dan beban ganda.

Analisis juga menilai sejauh mana perempuan dapat mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan merasakan manfaat dari hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan analisis ini, pemerintah diharapkan dapat mulai menilai dan memperbaiki kinerjanya dalam proses pembangunan.

Dari beberapa kajian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa semua proses intervensi terkait gender harus dimulai dari peningkatan pemahaman konsep gender itu sendiri bagi semua kalangan, mulai dari pihak BAPEMPER/KPP selaku leading sector di tataran pemerintahan, juga pejabat di institusi pemerintah dan legislative.

Semua lembaga pemerintah perlu didorong untuk lebih memperhatikan ketersediaan data kualitatif dan kuantitatif secara terpilih berdasarkan jenis kelamin, agar dapat lebih mudah mengukur sejauh mana program dan kebijakan pembangunan telah responsive terhadap kepentingan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara.

Penguatan kapasitas perlu dilakukan dengan merumuskan kegiatan-kegiatan pengembangan perspektif dan pengetahuan yang lebih dalam, terfokus dan mampu menjawab kebutuhan stakeholder dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Dan komponen ketrampilan terapan, perlu dilakukan dengan merumuskan kerangka advokasi yang mencakup semua tahapan, yakni implementasi, monitoring dan evaluasi mengingat saat ini intervensi baru pada tahapan perencanaan dalam skala yang masih mikro yaitu dalam program pemberantasan buta aksara.

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 09/06-2006

Judul Proyek: Kemitraan Indonesia dalam Pendanaan bagi HIV/AIDS (<i>Indonesian Partnership Fund for HIV/AIDS</i>)	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua dan Kota / Kabupaten, serta CBO / CSO sebagai lembaga pelaksana
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): Jumlah USD 47 juta, sedangkan alokasi untuk Papua sendiri sedang dibahas	Mitra penanggung jawab: Komisi Penanggulangan AIDS Nasional kerjasama dengan UNDP, lembaga PPB lain dan donor bilateral
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): Kemitraan Indonesia dalam Pendanaan bagi HIV/AIDS (<i>Indonesian Partnership Fund for HIV/AIDS</i>) dibentuk untuk mendukung Kerangka Tindakan Nasional (2005-2007) berdasarkan Strategi Nasional HIV/AIDS 2003-2007 guna membangun kemitraan berkesinambungan dalam penanggulangan HIV/AIDS. Kemitraan tersebut berkontribusi terhadap terbentuknya tanggapan lintas sector yang efektif dan berkelanjutan dalam menumpas dampak sosial- ekonomi dan kesehatan dari epidemi HIV/AIDS di masyarakat Indonesia. Kemitraan selama tiga tahun ini diharapkan akan menguatkan kapasitas untuk membatasi epidemi HIV/AIDS bagi kelompok penular dan daerah yang terkonsentrasi. Kesuksesan program ini diukur dari peluasan jumlah masyarakat yang dilayani HIV/AIDS/STI, termasuk program-program pengurangan resiko; sekretariat NAC yang bekerja secara penuh di tingkat nasional, provinsi, kota / kabupaten dan penyusunan Rencana Strategis (2007-2012) yang terpadu dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Kemitraan tersebut dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip harmonisasi dan koordinasi dalam upaya menyebarluaskan tanggapan nasional terhadap epidemi secara efektif dan cepat. Adapun lima komponen program ini adalah: <ol style="list-style-type: none">1. Pengurangan resiko HIV perorangan dari tansmisi seksual;2. Pengurangan resiko HIV perorangan dari penggunaan suntikan narkotika dan transmisi seksual pada pasangannya;3. Peningkatan kesadaran publik secara umum, khususnya pemuda, tentang kerentangan mereka terhadap infeksi HIV/AIDS dan sikap diskriminatif terhadap penderita HIV/AIDS (People Living With HIV/AIDS atau PLWHA);4. Perbaikan akses dan kualitas perawatan dan bantuan bagi penderita HIV/AIDS (PLWHA) dengan berfokus pada peningkatan penyuluhan dan pemeriksaan sukarela (Voluntary Counselling and Testing atau VCT), perawatan untuk kemungkinan infeksi (Opportunistic Infections atau OI) dan perawatan dan bantuan berbasis kelompok masyarakat; dan	

5. Penguatan kapasitas untuk memprioritaskan dan mengalokasikan dana bagi HIV/AIDS melalui operasionalisasi dari kerangka (3 in 1) di tingkat nasional, provinsi dan kota / kabupaten.

Papua merupakan salah satu contoh provinsi dengan tingkat kemiskinan dan perbedaan gender yang tinggi, di mana hal ini berdampak terhadap tingkat infeksi STI dan pemerataan HIV/AIDS lebih tinggi dari pada daerah lain di Indonesia. Hasil pemantauan memperlihatkan pemerataan lebih tinggi di masyarakat umum (ibu hamil, petani dan para istri) dari pada di antara kelompok transmisi seperti pekerja seks, di mana perhitungan tidak resmi menyebutkan sekitar 10 kali angka pemerataan yang lebih besar dari pada rata-rata pemerataan 0.1%.

Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung:

HIV/AIDS

Lokasi/ruang lingkup wilayah:

Kerjasama dengan pemangku kepentingan lain (perjanjian antara dua pihak atau bilateral, UN, GFATM, CBO/LSM lokal) dan KPADs di Kab Jayapura; Kota Jayapura; Kab Sorong; Kab Keerom; Kota Sorong; Kab Peg. Bintang; Kab Nabire; Kab Jayawijaya; Kab Puncak Jaya; Kab Paniai; Kab Mimika; Kab Biak; Kab Mappi; Kab Asmat; Kab Manokwari; Kab Fakfak; Kab Kaimana; dan Kab Merauke.

Pola Pelaksanaan:

Proses perumusan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dikoordinir oleh KPAD. Rencana kerja tahunan memerlukan persetujuan dari tingkat nasional dalam hal konsistensi terhadap Strategi Nasional AIDS, sedangkan Provinsi / Kabupaten / Kota menyusun sendiri strategi AIDS di tingkat lokal.

UNDP oleh donor utama diberikan kepercayaan dengan berperan sebagai pengelola keuangan untuk Kemitraan Indonesia dalam pendanaan bagi HIV/AIDS (Indonesian Partnership Fund for HIV/AIDS). Walaupun program hanya berlaku untuk 3 tahun (2005-2007), namun diperkirakan bahwa program akan diperluas seandainya donor dan mitra lain menambah kontribusi serta pemerintah daerah menyediakan tambahan dana dari APBD.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Kecepatan tanggapan menjadi urgensi kritis – penting sekali untuk memperluas tanggapan nasional secara cepat guna mencegah infeksi lebih jauh dan mengontrol epidemi. Untuk mempercepat penyediaan pelayanan, sambil memperkuat kapasitas koordinasi nasional, program ini mengambil pendekatan pelaksanaan yang bertahap dengan fokus pada:

- Penguatan Komisi Nasional AIDS dan sekretariatnya, serta Komisi-komisi Daerah AIDS, dalam melaksanakan peranan koordinasi nasional dan lokal dan memimpin tanggapan AIDS;
- Penguatan Kementerian yang memegang peranan kunci dalam kepemimpinan di sektor masing-masing;
- Penguatan mekanisme untuk pencairan cepat dari sumber dana yang ada secara efektif dan bertanggung jawab di tingkat nasional dan daerah desentralisasi.

Dengan pengesahan dari Komisi Nasional AIDS, fase pertama dari program berkolaborasi dengan dua proyek bilateral dari AusAID dan USAID untuk memperluas program yang ada. Selama fase ini, Komisi Nasional AIDS dan Komisi-komisi Daerah AIDS akan diperkuat. Komisi Nasional AIDS berkolaborasi dengan beberapa lembaga PBB untuk bekerja pada kegiatan di tingkat kebijakan, dimana bantuan bi-lateral bertahap berkurang selama fase kedua.

Mitra pelaksana lain termasuk: UNICEF, ILO, WHO, UNFPA, UNV, AusAID's Indonesian HIV/AIDS Prevention and Care Project (IHPCP), USAID's Aksi Stop AIDS (ASA) yang dikelola Family Health International (FHI) dan banyak mitra lokal lain.

NB: Web site KPA sedang disiapkan

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 10/06-2006

Judul Proyek: Capacity 2015 – Kemitraan bagi Pembangunan Berkesinambungan di Papua (<i>Partnerships for Sustainable Development in Papua</i>).	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): Capacity 2015 in Papua Project Management Team (PMT) 12 th Floor Menara Ravindo Jalan Kebon Sirih No. 75 Jakarta 10340 Tel: 3983189/10; Fax: 39831808 Email: cap2015-papua@indo.net.id
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): US\$ 1,025,000 (July 2004 – June 2007), Beyond Petroleum (BP) dan UNDP.	Mitra penanggung jawab: BP3D Papua, MenKo Ekuin dan UNDP dengan Mitra pelaksana lainnya: Pemerintah Daerah, BP, LSM setempat dan internasional, Kadin dan IFC/PENSA.
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): Dalam rangka memenuhi tantangan untuk pengurangan kemiskinan yang sejalan dengan pencapaian MDGs di Papua yang berkaitan dengan tujuan MDG pertama dalam bidang kemiskinan dan tujuan ketujuh yakni pada bidang lingkungan hidup, <i>Capacity 2015 – Partnerships for Sustainable Development in Papua (or Capacity 2015 in Papua)</i> diluncurkan pada tahun 2004 dengan perhatian khusus pada dukungan terhadap perencanaan tata ruang baru bagi periode 2005-2015 dan memperkenalkan suatu perencanaan pembangunan berbasis eko sistem guna memenuhi tujuan pengurangan kemiskinan secara keseluruhan. Proyek bertujuan bagi penggunaan lahan dan sumber air yang berkesinambungan serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati melalui perencanaan tata ruang baru untuk mengelola dampak negatif dari operasional BP atau LNG Tangguh serta investasi luar negeri lainnya yang berskala besar di wilayah Kepala Burung, Papua. Sementara itu, output yang diharapkan adalah untuk membangun suatu perencanaan tata ruang yang baru bagi wilayah Kepala Burung dan meluncurkan program pembangunan kapasitas guna mencapai pembangunan yang berkesinambungan pada tahun 2015. Pada tahap pelaksanaan awal dari Fase pertama (2004-2006), output yang dituju adalah: 1) meningkatkan kemitraan di antara pelaku bisnis, pemerintah dan masyarakat sipil, 2) perencanaan strategi pembangunan jangka panjang dan tata ruang wilayah yang diarahkan di wilayah Kepala Burung, 3) perbaikan peraturan dan proses pengaturan dalam mengelola peluang-peluang yang berkaitan dengan Beyond Petroleum (BP) Tangguh serta serta investasi luar negeri lainnya yang berskala besar di wilayah Kepala Burung, dan 4) meningkatkan kapasitas bagi pembangunan untuk mendukung	

pelaksanaan sistem penggunaan tata ruang bagi pencapaian hasil pembangunan yang berkaitan dengan MDG. Sampai dengan akhir Desember 2005, suatu program reorientasi yang dilaksanakan dengan mengintegrasikan output yang diharapkan dari dua kegiatan yakni menyelesaikan, sosialisasi dan mengesahkan Dokumen Perencanaan Pembangunan wilayah (Regional Development Planning atau RDP) serta merampungkan kawasan pengelolaan bersama atau Joint Management Area (JMA) in Teluk Bintuni, dengan revitalisasi dari tim Strategi Penyebaran dan Pemerataan Pertumbuhan (SP3) yang akan mendukung kegiatan RDP dan JMA.

Proyek bekerja sama secara erat dengan BP Tangguh dan pelaku pembangunan lainnya untuk mensinkronisasikan kegiatan di lapangan sehingga tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh lembaga lainnya di Papua. Pada saat ini, UNDP memiliki suatu program induk bagi kegiatan pembangunan di Papua bertajuk "Papua Development Programme" (PDP) yang telah mengintegrasikan *Capacity 2015 in Papua* sebagai salah satu mitra pelaksana dalam program induk. Proyek *Capacity 2015 in Papua* melengkapi kegiatan PDP dan lembaga PBB lainnya di Papua.

Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung:

Program berfokus pada perencanaan pembangunan pengelolaan sumber daya serta wilayah, khususnya perencanaan tata ruang, pembangunan kapasitas, penguatan kemitraan.

Lokasi/ruang lingkup wilayah:

Kabupaten dan Kota di wilayah Kepala Burung.

Pola Pelaksanaan:

Proyek memiliki 6 petugas lapangan (sebelumnya dinamakan petugas penghubung) di Jayapura, Sorong, Fak fak dan Teluk Bintuni. Proyek didukung oleh National Project Director (dari Menko Ekuin), Deputy National Project Director (dari BP3D Papua), anggota tim manajemen proyek di Papua (6 orang) dan Jakarta (9 orang) dengan dukungan kuat dari UNDP Environment Unit yang melaksanakan kegiatan proyek NEX.

Hasil proyek yang nyata yakni: dokumen rekomendasi dari perencanaan pembangunan wilayah, makalah konsep dari kawasan pengelolaan bersama (*JMA*) di Teluk Bintuni, dan tim SP3 di 8 Kabupaten dan 1 Kota di Kepala Burung. Tim SP3 ini telah dibentuk di beberapa Kabupaten yang didanai oleh pemerintah setempat guna mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Pada waktu yang lalu, dokumen perencanaan tata ruang tersedia namun tidak dilaksanakan berhubung pelbagai alasan. Pada saat ini diakui pentingnya untuk melibatkan para pemangku kepentingan setempat (pihak yang berwenang, lembaga masyarakat sipil, kelompok adat/suku, dan lain sebagainya) serta memberikan perhatian lebih banyak terhadap nilai-nilai setempat untuk membangun rasa kepemilikan dan meningkatkan penerimaan mereka terhadap perencanaan tersebut.

Status ketidakpastian dari provinsi Irian Jaya Barat (IJB) yang baru dibentuk, meskipun telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan November 2004, masih menciptakan konflik di antara pihak yang terkait. Hal tersebut mengakibatkan suasana lingkungan kerja yang kondusif dalam pelaksanaan kegiatan proyek yang direncanakan. Dalam rangka untuk tidak berpihak pada salah satu pihak yang terlibat, proyek berupaya untuk mempertahankan kesederhanaan dengan melakukan kegiatan pada tingkat Kabupaten sampai dengan status tersebut menjadi jelas. Aksi yang sama juga dilakukan terhadap kondisi serupa pada tingkat wilayah/Kabupaten (pembagian menjadi Kabupaten yang lebih kecil).

Dengan Undang-undang Otsus yang diberlakukan oleh pemerintah pusat kepada provinsi Papua akhir-akhir ini, pihak berwenang setempat telah diberikan mandat/otoritas yang memungkinkan mereka untuk memberikan perhatian lebih banyak terhadap ancaman lingkungan hidup di masing-masing wilayah. Penting adanya untuk melakukan program pembangunan kapasitas bagi pemerintah setempat (melalui pelatihan atau pendampingan) guna mendukung pemerintah setempat dalam melaksanakan model atau pola terbaik dalam melindungi lingkungan hidup dari kerusakan yang berdampak (*collateral damages*) terutama yang disebabkan oleh investasi luar negeri berskala besar.

Pembangunan infrastruktur di Papua, misalnya pembangunan jalan, telah menjadi akses jalan tol bagi operasi BP Tangguh LNG. Bagaimana pun, hal ini dapat memicu pertumbuhan penduduk yang lebih cepat yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Kajian melalui konsultasi publik mungkin dirasa perlu.

Guna meningkatkan kapasitas dan dukungan terhadap para pemangku kepentingan setempat, kegiatan perencanaan terpadu telah dilakukan untuk membangun dan meningkatkan kesadaran serta komitmen pemerintah mengenai pentingnya perencanaan pembangunan wilayah. Memperkuat kemitraan antara para pemangku kepentingan juga telah meningkatkan kesadaran dalam mencapai dampak yang lebih besar dari kegiatan mereka. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, beberapa model kemitraan telah ditawarkan oleh proyek sebagai landasan untuk membangun jaringan (*networking*) yang lebih efektif di antara para mitra.

Konsep SP3 telah ditawarkan untuk menghindari terjadinya penumpukan di sekitar wilayah operasi BP Tangguh LNG di Teluk Bintuni. Konsep yang dilakukan oleh tim SP3 telah dibentuk oleh wilayah-wilayah terkait melalui SK Bupati. Tim tersebut bekerja sama secara erat dengan pihak berwenang setempat dalam mencapai tujuan pembangunan. Kehadiran tim SP3 di wilayah tertentu meningkatkan tingkat partisipasi dari para pemangku kepentingan setempat untuk mendukung pelaksanaan konsep SP3.

Mempercepat pembangunan di wilayah proyek, oleh karena pentingnya untuk menyelaraskan dan mengoptimalkan peranan bisnis setempat berdasarkan pendekatan yang merata. Hal ini dapat mendorong partisipasi aktif dari para pelaku bisnis setempat dalam program pembangunan.

Sejumlah kecil anggota tim SP3 telah disediakan sejumlah alokasi dana oleh pemerintah setempat bagi kegiatan-kegiatan mereka. Akan tetapi, anggota tim masih kurang pemahaman terhadap konsep SP3, peranan/kegiatan-kegiatan yang disepakati di lapangan. Proyek telah menjadwalkan dalam mengambil langkah untuk revitalisasi guna memaksimalkan potensi tim SP3 melalui program pendampingan serta upaya inisiatif dalam melembagakan anggota tim SP3 di wilayah yang belum memiliki tim SP3 (mendapatkan SK Bupati dalam pembentukan tim SP3 di sana).

Pada awalnya, Tim Manajemen Proyek atau Project Management Team (PMT) telah melaksanakan kegiatan berdasarkan masing-masing luaran yang diharapkan yang tampaknya bukan hanya terintegrasi, akan tetapi juga berfokus pada kegiatan kunci proyek. Menjelang akhir tahun 2005, PMT mulai memfokuskan kegiatan proyek ke dalam dua kegiatan utama: RDP dan JMA yang didukung oleh tim SP3 serta mencoba mengajukan kemungkinan kolaborasi dengan program-program lainnya (dengan UNDP-PDP, dan lain sebagainya).

Sejumlah anggota PMT bertempat tinggal di Jakarta, dari pada di Papua. Ketidacukupan jumlah PMT yang berbasis di Papua telah mencegah program untuk mencapai jangkauan yang lebih luas karena sosialisasi program/penyebaran informasi tidak bisa secara mulus di kelompok sasaran (pada saat ini 6 PMT Papua meliputi 8 Kabupaten dan 1 Kota, di mana idealnya satu orang bagi satu Kabupaten/Kota).



Program Pembangunan Papua Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar

Lembar Informasi Proyek LIP 11/06-2006

Judul Proyek: Proyek Kemitraan dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin (<i>Partnerships for e-Prosperity for the Poor</i>) - Pe-PP	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): -
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): USD 1,476,795.-	Mitra penanggung jawab: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): <p>Program Partnerships for e-Prosperity for the Poor (Pe-PP) adalah sebuah program kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pe-PP dilaksanakan selama 3 tahun dimulai dari akhir 2004 dan akan berlangsung hingga 2007. Program ini adalah salah satu upaya untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian <i>Millenium Development Goals</i> (MDGs)</p> <p>Tujuan utamanya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memberdayakan masyarakat miskin melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi serta kemudahan mendapatkan pelayanan sosial melalui akses informasi dan komunikasi yang lebih baik.2. Membangun kerjasama strategis dengan pihak-pihak terkait untuk bersinergi dalam membangun informasi, layanan dan program kegiatan.3. Mendirikan Multipurpose Community Development Telecenter sebagai pusat informasi dan kegiatan masyarakat yang dapat diakses secara bersama serta sekaligus sebagai tempat dimana para mitra telecenter dapat memberikan layanan dan program kegiatannya untuk pengembangan masyarakat perdesaan.4. Mengumpulkan serta menyebarkan pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan program Pe-PP untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat umum atas potensi dan upaya mengurangi kemiskinan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta berkontribusi dalam mempengaruhi formulasi kebijakan nasional. <p>Di salah satu desa dari provinsi yang menjadi lokasi percontohan Pe-PP telah dan akan didirikan sebuah Multipurpose Community Development Telecenter yang merupakan tempat mengakses informasi, berkomunikasi dan mendapatkan layanan sosial dan</p>	

ekonomi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang diantaranya berupa komputer dan sambungan ke internet.

Saat ini tiga buah telecenter sudah berdiri dan beroperasi, yaitu: Telecenter e-Pabelan, di Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah; Telecenter Madu Rasa Muneng di Desa Muneng, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur; Telecenter Semeru di Desa Kertosari, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tiga buah telecenter lagi akan segera didirikan di Sulawesi, yaitu: Telecenter Lapulu di Kelurahan Lapulu, Kendari, Sulawesi Tenggara; Telecenter Salubomba di Desa Salubomba, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah; Telecenter Tuladenggi di Desa Tuladenggi, Kab. Gorontalo, Gorontalo. Sementara telecenter di Papua akan didirikan pada tahun 2006.

Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung:

Peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat dalam memperoleh informasi yang bermanfaat dan berkomunikasi dengan pihak luar untuk peningkatan kesejahteraannya

Lokasi/ruang lingkup wilayah:

Jawa Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Fak-fak (Papua)

Pola Pelaksanaan:

Pe-PP dilaksanakan di tingkat lokal dan nasional. Di tingkat nasional, Pe-PP dilaksanakan oleh Bappenas melalui sebuah tim proyek nasional. Seorang manajer proyek nasional akan memimpin tim nasional dan bertanggung pada Direktur Proyek yang ditunjuk dari Bappenas. Tim implementasi terdiri atas:

- a. Manajer proyek
- b. Konsultan nasional
- c. Tenaga ahli teknologi informasi
- d. Knowledge management and communication officer
- e. Asisten Proyek

Pada tingkat lokal, sebuah Tim Pembina Telecenter Desa dibentuk dengan beranggotakan pimpinan formal dan informal desa, seperti kepala desa, kepala agama, ketua tani, dsb. Tim pembina telecenter akan mengarahkan kegiatan telecenter dan memastikan agar Telecenter berjalan dengan baik dan memiliki aktivitas yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat miskin.

Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat, Telecenter juga akan memiliki Tim pengelola Telecenter yang bekerja penuh waktu. Tim pengelola minimalnya terdiri atas: seorang Ketua Pengelola Harian Telecenter, seorang Pendamping Lapangan/Infomobiliser, dan seorang Tenaga Ahli IT.

Untuk Papua survey lokasi sudah dilakukan di Kabupaten Fak-fak sebagai satu pilot project, pada perkembangan selanjutnya telecenter bisa dikembangkan di wilayah lain di Papua.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Beberapa kisah sukses telah bermunculan di lokasi Telecenter. Kisah-kisah sukses ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan atas pola pikir dan pola laku masyarakat desa. Fasilitas Telecenter telah memperkenalkan cara-cara baru dan ide-ide inovatif pada kelompok-kelompok masyarakat dalam memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Sebelum Telecenter berdiri masyarakat pedesaan umumnya menunggu petunjuk/arahan dari pimpinan mereka atau pegawai pemerintah desa. Kini setelah adanya Telecenter, masyarakat mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan mandiri dan membuat keputusan berdasarkan pada informasi yang akurat yang diperolehnya melalui fasilitas Telecenter.

Beberapa kisah sukses:

- a. Seorang petani melon di desa Muneng berhasil meningkatkan dan memperbaiki produksi melon setelah memperoleh teknik penanaman melon yang lebih tepat dan efektif dari internet. Berbekal teknik-teknik penanaman melon ini, petani tersebut mengaplikasikannya di lahan pertaniannya dan berhasil menekan ongkos produksi melalui pengaturan penggunaan air. Melon yang dihasilkannya kini lebih baik dengan kualitas buah lebih besar dan manis.
- b. Seorang pemuda di desa Pabelan yang belajar mengoperasikan komputer dari Telecenter berhasil memenangkan posisi kedua lomba kreatifitas digital tingkat nasional. Pemuda tersebut memperoleh hadiah uang yang akan digunakannya untuk memulai membuat usaha desain pembuatan kartu undangan dan ucapan dari komputer. Pemuda ini juga memperoleh kesempatan pelatihan komputer lanjutan di Korea.
- c. UKM lokal di desa Kertosari memasarkan hasil kerajinannya/produksinya melalui internet. Mereka memotret produksi lokal mereka dan meletakkannya di situs internet. Kini mereka memperoleh penawaran dan pesanan dari luar daerah bahkan luar negeri.

NB: Tambahan informasi dapat diperoleh di www.ict4pr.org. Tersedia pula materi publikasi lainnya seperti leaflet dan *document kit* proyek.



Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar

Lembar Informasi Proyek LIP 12/06-2006

Judul Proyek: Dukungan terhadap Pembangunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Millenium (<i>Millenium Development Goals</i> atau MDGs) di Indonesia	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): Menko Kesra; c/o Deputy VI untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta (021) 352-4695
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): USD 900,000 (UNDP, April 2004 – Maret 2006)	Mitra penanggung jawab: Menko Kesra; c/o Deputy VI untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): Program dua tahun yang mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan dengan jalan meningkatkan kesadaran dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (poverty reduction strategies atau PRS). Tujuan program ini meliputi: (a) Membangun dukungan yang luas dan berkesinambungan penanggulangan kemiskinan and pencapaian MDGS; dan (b) Memastikan adanya kapasitas yang cukup di wilayah untuk membangun dan melaksanakan PRS setempat. Konsultasi partisipatif yang meliputi lintas sektoral antara pemerintah dan para pemangku kepentingan non pemerintah, kampanye media, pelatihan bagi para pelatih, bantuan teknis langsung, serta fasilitasi yang digunakan untuk mempromosikan proses partisipatif dan pelaksanaan MDGs dalam penyusunan, pemantauan evaluasi PRS setempat. Program menyediakan bantuan khusus untuk menyusun PRS setempat di lima provinsi dan distrik terpilih.	
Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung: Kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin, pembangunan kapasitas	Lokasi/ruang lingkup wilayah: Papua (Kabupaten Jayapura), Maluku (Kabupaten Pulau Buru), Maluku Utara (Kabupaten Halmahera Utara), Sulawesi Tengah (Kabupaten Parigi Moutong), Aceh (Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Tengah)

Pola Pelaksanaan:

Di tingkat Nasional, proyek dilaksanakan oleh Menko Kesra. Di bawah Program Direktur Nasional (National Programme Director atau NPD) yang ditugaskan oleh lembaga pelaksana, satu tim bantuan teknis bertanggung jawab untuk memfasilitasi aktivitas pada tingkat Provinsi dan Distrik; dan memastikan keterkaitan antara pelbagai bidang pembangunan dalam debat kebijakan nasional. Tim inti pada tingkat nasional terdiri atas:

- Kepala Penasihat Teknis/Ahli Kebijakan
- Perencana Pembangunan Wilayah
- Koordinator pelatih
- Petugas Media

Pada tingkat Provinsi dan Kabupaten, fasilitator wilayah direkrut secara lokal untuk memimpin koordinasi dan fasilitasi dengan rekanan pemerintah serta memobilisasi para pemangku kepentingan non pemerintah yang terdiri atas komunitas, lembaga masyarakat sipil, akademisi, media dan sektor swasta guna berpartisipasi dalam debat kebijakan pembangunan dan proses perencanaan.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Salah satu pengalaman keberhasilan dalam proyek didapat dari liputan luas media dan menggerakkan dialog aktif publik mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian MDGs setempat, melalui promosi kepemilikan MDGs oleh para jurnalis dan media sebagai agen pembangunan. Sebagai hasil pelatihan yang dilakukan oleh proyek, jurnalis di lima provinsi percobaan telah mengorganisir diri mereka ke dalam forum yang mempromosikan perhatian media terhadap permasalahan yang berkaitan dengan MDGs. Sebagai contoh:

- Setelah menerima umpan balik positif dari talkshow interaktif di radio lokal melalui proyek, pemerintah lokal di Maluku Utara menyelenggarakan pertunjukan yang meningkatkan diskusi kebijakan publik yang menampilkan para pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan non pemerintah.
- Jurnalis di Maluku Utara telah mengelompokkan diri mereka ke dalam pelbagai sektor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan, untuk bertanggung jawab untuk meningkatkan liputan permasalahan-permasalahan tersebut di media masing-masing dan memantau dengan menyimpan klipings dan lain sebagainya.
- Secara serupa, Forum Jurnalis Peduli MDGs di Sulawesi Tengah telah mengundang para pelaku kunci di Provinsi, meningkatkan profil MDGs di wilayah tersebut, menghasilkan suatu deklarasi untuk meningkatkan porsi dan frekuensi liputan media yang berkaitan dengan permasalahan MDGs untuk berkomitmen terhadap kebijakan dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin serta pencapaian MDGs. Deklarasi ini ditandatangani oleh para pemimpin media setempat, Gubernur, Wali Kota, Kepala Distrik dan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat setempat serta LSM di provinsi.
- Dalam rangka untuk memastikan bahwa anggaran pemerintah lokal pada tahun berikutnya berpihak pada masyarakat miskin, maka pada tahun 2005 Forum Sulawesi Tengah juga bekerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat setempat pada melaksanakan diskusi publik. Hal tersebut dilakukan sebelum diberikannya persetujuan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat setempat.

Komitmen pemerintah setempat lebih lanjut didemonstrasikan oleh beberapa pemerintah distrik dengan jalan mengalokasikan anggaran bagi komite dan program penanggulangan kemiskinan, misalnya alokasi anggaran negara dalam menyediakan jaminan bagi keluarga miskin yang mengajukan pinjaman dan mendorong bebas biaya pendidikan dasar.

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 13/06-2006

Judul Proyek: Rekonstruksi Pembangunan Sarana Fisik kebutuhan Dasar bidang: Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat pasca Bencana Alam Nabire 2004.	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): NGOs di Nabire yang di koordinir YABIMU masing-masing: : - YPK, YPPK, YPPGI, YAPIS bergerak di bidang Pendidikan - YABIMU menangani bidang perumahan rakyat - Yayasan Primary menangani bidang Kesehatan
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana): Dukungan UNDP via PKM Jakarta bermitra dengan PCSSF/YDPMS(Yayasan Dana Penguatan Masyarakat sipil Papua) dengan nilai kontrak: Rp. 2,000,000,000,-	Mitra penanggung jawab:
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): Dukungan rekonstruksi pembangunan sarana fisik bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat, diberikan untuk membantu warga nabire yang terkena musibah gempa bumi Nabire pada tanggal 6 Februari dan 26 November 2004 menyebabkan semua infrastruktur di kota Nabire hancur total. Semua infrastruktur yang melayani kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat benar-benar hancur. Banyak anak belajar di tenda-tenda, termasuk rumah sakit dan puskesmas di kota nabire tak bisa dipakai, namun pelayanan terhadap masyarakat di lakukan di tenda-tenda. Bantuan ini bertujuan untuk: a) Mengembalikan kondisi warga yang terkena musibah gempa bumi kepada kondisi semula; b) Memberikan percontohan (<i>pilot project</i>) pembangunan kembali (rekonstruksi) dengan model partisipatif dimana melibatkan masyarakat penerima manfaat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.	
Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung:	Lokasi/ruang lingkup wilayah:

<p>Bidang Pendidikan: di beri perhatian pada pembangunan gedung TK yang belum mendapat perhatian dari pemkab;</p> <p>Bidang Kesehatan : Pengadaan peralatan kesehatan yang rusak akibat gempa, Bidang Perumahan Rakyat: Rumah Type 36 yang di kerjakan secara kelompok oleh warga yang terkena musibah sendiri;</p>	<p>Semua bantuan ini difokuskan pada kota Nabire, karena kerusakan terberat terjadi di wilayah kota. Namun bantuan untuk bidang kesehatan, peralatan yang di bantu manfaatnya dirasakan pula oleh warga di luar kota Nabire.</p>
<p>Pola Pelaksanaan:</p> <p>Program ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, di mana ketika program bantuan ini hendak digulirkan diawali dengan lokakarya penggalan kebutuhan. Dari hasil penggalan kebutuhan tersebut disepakati secara bersama kebutuhan dasar yang perlu di tangani. Usulan program bantuannya disusun berdasarkan kesepakatan yang di lakukan secara partisipatif. Disepakati pula bahwa program ini dilaksanakan secara partisipatif oleh para penerima manfaat proyek itu sendiri.</p>	
<p>Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:</p> <p>Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan belum bisa dilaporkan sekarang secara total karena proyek masih dalam tahap pelaksanaan. Rata-rata pelaksanaan proyek sudah mencapai 60 %.</p>	



Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar

Lembar Informasi Proyek LIP 14/06-2006

Judul Proyek: Program Kesehatan dan Gizi Proyek kesehatan: Memperbaiki kesehatan di Timur Indonesia; Imunisasi; Malaria Proyek Gizi: Suplemen Vitamin A; Pemantauan Pertumbuhan	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): BP3D merupakan mitra koordinasi serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan di 5 Kabupaten (Jayapura, Jayawijaya, Biak, Monokwari, Sorong) sebagai mitra pelaksana
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana): Sekitar US\$ 800.000 per tahun (pembayaran langsung kepada Pemerintah untuk kegiatan) tidak termasuk dana untuk konsultan, biaya operasional kantor UNICEF dan perlengkapan serta dana untuk imunisasi yang langsung dicairkan di tingkat nasional. UNICEF dan negara donor lainnya, seperti AusAID dan USAID.	Mitra penanggung jawab: Departemen Kesehatan
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): Tujuan dari proyek Kesehatan: Memperbaiki kesehatan kelahiran di 5 Kabupaten (melalui dukungan terhadap kebijakan, perencanaan dan pemecahan permasalahan, pengembangan sistem kesehatan dan pengontrolan kualitas, penyediaan layanan dan jaringan antar komunitas), perbaikan penanganan malaria (melalui pelatihan untuk memperbaiki diagnosis dan perawatan terhadap malaria bagi ibu hamil dan anak-anak di bawah 5 tahun, serta melalui pendistribusian kelambu), memperbaiki wilayah cakupan dari perluasan program imunisasi atau EPI (melalui kampanye imunisasi: sosialisasi, advokasi, pertemuan dengan pemimpin agama dan pemimpin masyarakat, pengawasan karyawan dan pendidikan kesehatan di masyarakat).	

<p>Tujuan proyek gizi: Memperbaiki wilayah cakupan Vitamin A (melalui penyediaan dan pendistribusian Vitamin A dua kali per tahun), memperbaiki pengetahuan para ibu dan pengasuh mengenai pemantauan terhadap pertumbuhan (melalui pendidikan kesehatan dan kompetisi bayi sehat), memperbaiki pengetahuan dan keterampilan kader pos yandu (melalui pelatihan dan kompetisi).</p>	
<p>Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung:</p> <p>Kesehatan dan gizi</p>	<p>Lokasi/ cakupan wilayah kerja geografi:</p> <p>3 Kecamatan di 5 Kabupaten (Jayapura, Jayawijaya, Biak, Manokwari, Sorong) Proyek imunisasi juga meliputi di luar Kabupaten di Provinsi.</p>
<p>Pola Pelaksanaan:</p> <p>Rencana kerja tahunan bersama mitra pemerintah; project officer UNICEF memberikan bantuan teknis bersama dengan staf departemen kesehatan nasional, provinsi dan kabupaten, pembiayaan melalui departemen kesehatan dan pada tingkat kabupaten melalui Bappeda, UNICEF menyediakan proyek percontohan dan mendorong pembiayaan melalui APBD bagi replika proyek, pemantauan di lapangan melalui UNICEF dan mitra (termasuk BP3D), pertemuan pemantauan bulanan dengan BP3D, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan BPMD.</p>	

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Suatu dokumen perencanaan mengenai tim pemecah permasalahan di Kabupaten atau *District Team Problem Solving* – Membuat Kehamilan lebih aman, telah dikembangkan di 5 kabupaten fokus dan dengan pendanaan APBD di replika 5 luar fokus kabupaten. Pemantauan dan lokakarya evaluasi dalam.

Membuat Kehamilan yang lebih aman memperbaiki kesehatan kelahiran di timur Indonesia yang telah dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan bagi indikator realistis dan praktis dalam pengukuran hasil. Kandidat pengarah klinis yang dilatih di Surabaya untuk memastikan bahwa Papua akan memiliki pelatih yang andal dan dapat diandalkan untuk melakukan layanan normal perawatan.

Advokasi rencana DTPS kepada DPRD (Komisi E: Kesejahteraan sosial) yang dilakukan melalui Kantor Dinas Kesehatan dalam rangka mendapat dukungan APBD di masa yang akan datang.

Pelaksanaan mobilisasi kampanye sosial tentang kesehatan ibu dan anak.

Komisi provinsi dalam mengatasi efek samping imunisasi (kejadian ikutan paska imunisasi/KIPI) (kejadian ikutan paska imunisasi/KIPI) yang mendukung pekan imunisasi nasional di 20 Kabupaten di Papua.

Seluruh Kabupaten (fokus dan non fokus) telah mendukung pelaksanaan hari imunisasi nasional terhadap kampanye polio selama 3 putaran.

Kampanye campak dimulai di wilayah pegunungan guna mengatasi ancaman wabah campak yang disebabkan oleh wilayah cakupan yang terbatas.

Fasilitasi dalam perencanaan dan pengelolaan, serta komitmen dari pihak pemerintah mempunyai peranan penting terhadap kesinambungan program.

Advokasi terhadap anggota DPRD sangat penting guna pemahaman terhadap program dan proyek serta dukungan mereka terhadap replikasinya.

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 15/06-2006

Judul Proyek: Child Protection (Perlindungan Anak)	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): BP3D Provinsi, Bappeda Kabupaten, Dinas Catatan Sipil & Kependudukan
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana):	Mitra penanggung jawab:
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktifitas): Ada 2 proyek di bawah program Perlindungan Anak ini, yaitu : a. Proyek : Akta Kelahiran (i) Mendukung pengembangan dan pelaksanaan peraturan yang baru tentang Catatan Sipil yang menjamin pencatatan dan surat kelahiran yang non-diskriminatif, mudah dicapai dan terjangkau ; (ii) Meningkatkan cakupan pencatatan kelahiran sebelum ulang tahun pertama anak sebesar 40 %. b. Proyek : Perlindungan Anak dari Kekerasan, Pelecehan Meningkatkan kapasitas Jaringan Perlindungan Anak (seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Anak pasal 75) di tingkat Propinsi dalam melakukan advokasi perlindungan anak dalam hubungannya dengan tujuan tahunan lainnya. Adapun aktivitas yang mendukung tercapainya tujuan tersebut antara lain : a. Proyek : Akta Kelahiran Mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan cakupan pencatatan kelahiran, yang bisa dicapai dari dua sisi : Sisi Pemerintah : - Adanya peraturan daerah yang mempermudah mendapatkan Akta Kelahiran, misalnya dengan <i>free of charge</i> , pendekatan pelayanan, kemudahan pengurusannya dll - Aparat pemerintah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. - Tersedianya data kependudukan yang baik dan lengkap. Sisi Masyarakat : - Adanya pemahaman pentingnya kepemilikan akta kelahiran - Adanya keinginan untuk b. Proyek : Perlindungan Anak dari Kekerasan, Pelecehan Jaringan Peduli Anak yang sudah ada dapat memfasilitasi segala kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan Hak-hak Anak.	

<p>Ruang lingkup fokus / sektor yang didukung:</p> <p>a. Proyek : Akta Kelahiran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan teknis untuk menyusun Peraturan Daerah yang mempermudah anak mendapatkan Akta Kelahiran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. - Pelatihan kepada staff dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta staff distrik dalam Pencatatan Sipil dan Vital Statistik. - Kampanye Akta Kelahiran, untuk meningkatkan permintaan terhadap Akta Kelahiran. <p>b. Proyek : Perlindungan Anak dari Kekerasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan teknis untuk memperkuat Jaringan Peduli Anak - Dukungan kepada Jaringan Peduli Anak untuk melakukan fungsinya melakukan advokasi dan sosialisasi Hak-hak Anak. 	<p>Lokasi/ruang lingkup wilayah:</p> <p>a. Proyek Akta Kelahiran Kegiatannya adalah mendukung Tim Kabupaten untuk menyusun Peraturan Daerah yang mempermudah anak mendapatkan Akta Kelahiran, baik di tingkat provinsi maupun di 5 kabupaten, yaitu Kab. Biak Numfor, Jayapura, Jayawijaya, Manokwari dan Sorong.</p> <p>b. Proyek Perlindungan Anak dari Kekerasan, Pelecehan Kegiatannya adalah mendukung Jaringan Peduli Anak di Kota Jayapura.</p>
<p>Pola Pelaksanaan:</p> <p>a. Proyek Akta Kelahiran UNICEF memberikan bantuan teknis dan dana untuk penyusunan peraturan daerah yang mempermudah anak mendapatkan akta kelahiran. Peraturan daerah yang dimaksud adalah Perda di tingkat kabupaten maupun Perdasi di tingkat provinsi. Selain itu UNICEF juga mendukung sosialisasi kepada seluruh stake holder akan pentingnya akta kelahiran ini agar nantinya mendapatkan dukungan terhadap program ini. Advokasi kepada pemerintah legislatif juga dilakukan terus menerus agar draft peraturan daerah yang dihasilkan segera dapat disyahkan.</p> <p>Dengan adanya peraturan daerah yang mempermudah anak mendapatkan akta kelahiran, maka diharapkan adanya peningkatan permintaan terhadap akta kelahiran. Untuk mengimbangi peningkatan permintaan tersebut staff dinas Kependudukan & Catatan Sipil maupun staff distrik harus dipersiapkan. Oleh karena itu UNICEF juga mendukung pelatihan kepada staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta staf distrik di Kabupaten Manokwari, kabupaten yang sudah menghasilkan peraturan daerah.</p> <p>Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya akta kelahiran, maka dilakukan Kampanye Akta Kelahiran. Kampanye dilaksanakan di Kabupaten Manokwari, yang pencancangannya dilakukan oleh Bupati Manokwari, pada tanggal 9 Februari 2006. Media kampanye meliputi spanduk, poster, flyer, radio dan televisi.</p> <p>b. Proyek : Perlindungan Anak dari Kekerasan Ada 2 sub-proyek di bawah proyek ini, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub-proyek : Perlindungan dari Penyiksaan dan Kekerasan Dilakukan dengan memberikan penguatan terhadap penerapan langkah-langkah yang mencegah, melindungi dan memberi tanggapan pada eksploitasi seksual dan ekonomi dan perdagangan anak. <p>Kegiatan yang dilakukan dalam sub-proyek ini adalah membekali guru dan staff Dinas Pendidikan dengan pengetahuan tentang Sekolah Ramah Anak. Pilot Proyek akan dilaksanakan di 5 SD di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom. Selain itu juga memperkuat Jaringan Peduli Anak dengan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub-proyek : Peradilan Anak dan Legal Reform Hasil yang diharapkan adalah adanya sistem peradilan anak yang sensitive ramah anak dan sensitive gender dalam sebuah sistem monitoring yang terintegrasi dan mekanisme pemulihan yang melibatkan masyarakat dikembangkan dan diterapkan. <p>Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan pelatihan bagi Polisi yang menangani anak yang bermasalah dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, korban maupun saksi. Pelatihan diberikan kepada 30 polisi di wilayah Polda Papua, yang berasal dari Bagian Reskrim Polda Papua, SPN Jayapura, Polresta Jayapura dan Sorong, serta dari Polres Biak Numfor, Jayapura, Jayawijaya, Manokwari, Sorong dan Timika. Pemilihan Polres disesuaikan dengan banyaknya kasus dijumpai pada lokasi-lokasi tersebut. Pelatihan akan diteruskan dengan Pelatihan untuk Pelatih di tingkat provinsi agar nantinya sudah ada pelatih di lingkup Polda Papua untuk pelatihan-pelatihan sejenis.</p>	

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

a. Proyek : Akta Kelahiran

- Sudah diterbitkannya Perda di Kabupaten Manokwari yang mempermudah anak mendapatkan Akta Kelahiran.
- Staff Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan stff distrik dari 19 distrik di Kabupaten Manokwari sudah dilatih dalam Pencatatan Sipil dan Vital Statistik.
- Kabupaten Manokwari merupakan salah satu dari 27 kabupaten dan kota di Indonesia yang telah menerbitkan Perda yang mempermudah anak mendapatkan Akta Kelahiran.
- Kampanye Akta Kelahiran dilaksanakan di Kabupaten Manokwari pada bulan Februari 2006.
- Program ini.



b. Proyek : Perlindungan Anak dari Kekerasan

- Dihasilkannya Pemetaan Anak Rawan di Kota Jayapura dan telah diseminarkan dan diinformasikan kepada masyarakat luas.
 - Jaringan Peduli Anak telah dapat melakukan pertemuan secara rutin.
 - Berjalannya fungsi Jaringan Peduli Anak dalam memberikan advokasi dan sosialisasi tentang Hak-hak Anak.
- 30 Polisi di wilayah hukum Polda Papua dilatih penanganan anak yang bermasalah dengan hukum, baik anak sebagai korban, pelaku maupun sebagai saksi. Diharapkan dalam penanganan permasalahan anak mereka lebih "sensitive anak". Dukungan Kapolda dan jajarannya sangat membantu dalam pelaksanaan pelatihan ini.

Adanya kemauan dari Pemerintah Daerah dan seluruh stake holder yang ada sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program ini.

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 16/06-2006

<p>Judul Proyek:</p> <p>CLCC (<i>Creating Learning Communities for Children</i>). Dalam konteks Departemen Pendidikan Nasional disebut sebagai SBM (<i>School-Based Management</i>) atau MBS (Manajemen Berbasis Sekolah).</p>	<p>Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email):</p> <ul style="list-style-type: none">- BP3D sebagai mitra koordinasi di tingkat provinsi (Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jl. Sumatera Dok II, Telp. 0967 532402; Fax 0967 533912); Sebagai pelaksana langsung kegiatan:- Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Papua (Jl. Tanjung Ria Base-G, Telp. 0967 - 541 060/541842; Fax 0967 541842);- Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura (Jl. Sentani-Depapre, Gunung Merah, Sentani, Telp. 0967 – 594716)- Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Sorong (Jl. Klamono, KM 24, Kab.
---	---

	<p>Sorong)</p> <p>- Dinas Pendidikan Kab. Biak Numfor (JI. Majapahit, Telp. 0981 – 21288; Fax 0981 - 23574)</p> <p>- Dinas Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah Kab. Manokwari (JI. Pahlawan, Telp. 0986- 211679; Fax: 0986-214 760)</p> <p>- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jayawijaya (JI. Jl. Diponegoro Wamena Telp. 0969-31141)</p>
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana):</p> <p>± 3 juta USD dari NZAID, Selandia Baru (2002-2005) dan ± 2,8 juta USD dari AusAID, Australia (2004-2006).</p>	<p>Mitra penanggung jawab:</p> <p>BAPPENAS dan Depdiknas bekerja sama dengan UNICEF dan UNESCO.</p>
<p>Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):</p> <p>Tujuan program ini adalah memberikan kontribusi bagi perbaikan kualitas Pendidikan Dasar di Indonesia. Program ini bermaksud untuk mengembangkan dan mendesiminasikan sebuah model yang sesuai dan dapat direplikasi dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran anak-anak Sekolah Dasar di Indonesia dan khususnya di Papua melalui penerapan 3 pilar/komponen program ini yaitu Manajemen Sekolah, PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), dan PSM (Peran Serta Masyarakat). Seiring dengan keluarnya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka bidang pendidikan pun berubah dari pola sentralisasi kepada desentralisasi dimana penanganan kebijakan pendidikan diserahkan lebih banyak kepada sekolah sebagai institusi pendidikan terendah yang lebih mengetahui situasi sekolahnya sendiri untuk mengembangkan sekolah dengan menghimpun dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada disekelilingnya.</p> <p>Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini adalah: Workshop Orientasi Program MBS, Rapat Koordinasi Tim Kerja MBS, Monitoring Tim Kerja MBS, Pelatihan Berjenjang (Nasional-Sekolah), Block Grant bagi sekolah untuk PAKEM (hanya untuk sekolah rintisan tahun pertama), Studi banding ke sekolah MBS, Pertemuan, Peninjauan dan Perencanaan.</p>	
<p>Ruang lingkup fokus / sektor yang didukung:</p> <p>Program ini difokuskan bagi Sekolah</p>	<p>Lokasi/ruang lingkup wilayah:</p> <p>5 Kabupaten kerjasama Pemda Papua dan Unicef (Jayapura dan Sorong (AusAID),</p>

<p>Dasar melalui peningkatan kualitas guru, manajemen Kepala Sekolah dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung pendidikan. Selain itu, mempromosikan perluasan/desiminasi serta pengadopsian program secara menyeluruh melalui formulasi kebijakan dari pemerintah.</p>	<p>Manokwari, Jayawijaya, Biak Numfor (NZAID)). Masing-masing Kabupaten terdapat 3 distrik/kecamatan fokus yang menjadi lokasi sasaran, mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan perangkatnya sampai kepada masyarakat di sekitar distrik-distrik tersebut. Jumlah Sekolah yang telah didukung adalah 179 SD/MI (NZAID) dan 59 SD/MI (AusAID).</p>
<p>Pola Pelaksanaan:</p> <p>Program ini memiliki Tim koordinasi inti yang mengkoordinir semua sektor bertempat dan dipimpin oleh BP3D Provinsi di tingkat provinsi yang disebut sebagai Tim KHPPIA (Kelangsungan Hidup, Perkembangan, Perlindungan Ibu dan Anak). Ditingkat pelaksana, dibentuk Tim Kerja MBS Propinsi, Kabupaten dan Distrik. Tim Kerja MBS inilah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kegiatan yang telah disepakati bersama dalam sebuah Rencana Tahunan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten dan Distrik. Hasil kegiatan dipertanggungjawabkan kepada Unicef dan juga dilaporkan kepada Tim KHPPIA serta Dinas Pendidikan setempat. Kemajuan program dievaluasi melalui monitoring oleh Tim Kerja masing-masing dan dievaluasi dalam Pertemuan Review dan Perencanaan tahunan di tingkat Propinsi.</p>	

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Beberapa kemajuan dan perubahan yang telah terjadi adalah :

- Terbentuknya Tim Kerja MBS dari tingkat provinsi sampai ke tingkat distrik/kecamatan.
- Meningkatnya kepedulian atau perhatian Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan melalui penyediaan dana pendamping/pendukung program kerjasama ini dari APBD provinsi maupun Kabupaten.
- Dukungan masyarakat terhadap pendidikan mulai meningkat dalam berbagai bentuk seperti dana melalui Komite Sekolah, daya melalui pembangunan fisik gedung sekolah secara cuma-cuma, dan pikiran dalam mengembangkan sekolah kedepan.
- Terjadinya Replikasi model MBS ke beberapa Kabupaten/Kota non kerjasama Pemda Papua-Unicef dengan dana APBD.
- Siswa mulai berani mengemukakan pendapat, mengembangkan kreatifitas sehingga efektif namun tetap menyenangkan.
- Para guru mulai mengembangkan berbagai metode mengajar yang kreatif dan menyenangkan.

Beberapa perkembangan kegiatan

- kerjasama Depdiknas-Unicef-Unesco telah mengadakan pertemuan untuk mendesain program CLCC untuk fase kedua. Untuk menghadiri pertemuan di Surabaya pada tanggal 24-26 Juli 2006, ditunjuk mewakili Papua dari Kab. Biak Numfor sejumlah 4 org : 2 dari Dinas Pendidikan Kab; 1 dari BP3D dan 1 dari Depag.
- kegiatan CLCC di 5 kabupaten sementara berlangsung meliputi pelatihan, advokasi, monitoring serta koordinasi. Untuk kabupaten binaan NZAID berakhir September 2006 sedangkan kabupaten binaan AusAID sd Desember 2006.

Pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa pemerataan guru di setiap sekolah sangat diperlukan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan juga perhatian Dinas Pendidikan dalam bentuk monitoring dan supervisi secara berkala dapat memberikan dorongan yang sangat berarti bagi para kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah. Untuk mendukung proses belajar, sarana dan prasarana seperti buku paket dan bacaan menjadi sangat penting.



Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar

Lembar Informasi Proyek LIP 17/06-2006

Judul Proyek: Tumbuh Kembang Anak (<i>Early Child Development</i>)	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): BPMD Provinsi Papua, dengan didukung instansi terkait seperti BP3D, Dinas Kesehatan, Dinas P & P, BKKBN, LSM, Universitas dan PKK.
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana):	Mitra penanggung jawab:
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): Program ini bertujuan agar bayi dan balita mendapatkan pelayanan tumbuh kembang yang terintegrasi optimal di Posyandu, BKB, Sekolah Minggu serta pelayanan tumbuh kembang anak lainnya. Kegiatannya adalah mengintegrasikan kegiatan tumbuh kembang anak pada wadah yang sudah ada sampai ke pelosok perdesaan, yaitu Posyandu dengan menambahkan kegiatan untuk memberikan stimulant pada perkembangan anak. Wadah yang terbentuk tersebut diberi nama Taman Posyandu.	
Ruang lingkup fokus / sektor yang didukung: - Dukungan pada Tim Provinsi untuk menyusun pedoman Taman Posyandu - Pelatihan kepada Tim Pelatih di tingkat provinsi & kabupaten - Pelatihan kepada kader-kader - Monitoring dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh tim provinsi dan kabupaten.	Lokasi/ruang lingkup wilayah: Kegiatannya adalah mendukung Tim di tingkat provinsi dan kabupaten serta pelatihan kader di 5 kabupaten, yaitu Kab. Biak Numfor, Jayapura, Jayawijaya, Manokwari dan Sorong.

Pola Pelaksanaan:

UNICEF memberikan bantuan teknis dan dana untuk pembentukan Tim di tingkat provinsi yang menyusun program tumbuh kembang anak yang bisa diintegrasikan kepada wadah yang selama ini sudah ada. Tim ini terdiri dari dinas & instansi terkait, seperti BPMD, BP3D, Dinas Kesehatan, Dinas P & P, BKKBN, LSM, Universitas dan PKK.



Tim provinsi menyusun pedoman tentang wadah yang dapat mengintegrasikan aspek tumbuh dan kembang anak dalam wadah yang selama ini ada, yaitu Posyandu. Wadah baru hasil integrasi tersebut dinamakan Taman Posyandu. Dari pedoman yang sudah dihasilkan tersebut dilakukan pelatihan di tingkat provinsi kepada pelatih di tingkat kabupaten. Pelatihan dilakukan selama 5 hari, dengan difasilitasi WHO CC Bandung.

Sebagai tindak lanjut pelatihan di provinsi, dilakukan pelatihan kepada kader di tingkat kabupaten. Kader yang dilatih adalah kader-kader posyandu.

UNICEF memberikan bantuan teknis dan dana sampai pelatihan kader di tingkat kabupaten. Selain itu juga memberikan bantuan berupa peralatan permainan edukasi dan peralatan untuk pemberian makanan tambahan.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

SENDRASASIA POST, 10/2/06

Tiap Distrik Diminta Bentuk Taman Posyandu

SENTANI - Wakil Bupati Ir Tunggal TH Simbolon mengungkapkan bahwa mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka diperlukan perhatian

Dari Peringatan Hari Gerak PKK dan KB Kesehatan

terhadap kesehatan dan pendidikan anak pada usia dini. Untuk menunjang tersebut, diharapkan bahwa kader-kader posyandu di masing-masing distrik bisa mengawali untuk membentuk satu taman posyandu di satu kampung dalam satu distrik.

"Saat ini pemerintah Kabupaten Jayapura bekerja sama dengan Unicef telah melakukan kegiatan percontohan di tiga distrik untuk taman posyandu. Pada tahun 2006 ini, kita akan replikasikan di semua distrik, sehingga masing distrik sudah mulai membentuk taman posyandu," tutur Wabup saat menghadiri puncak acara Hari Gerak PKK dan KB Kesehatan yang digelar di lapangan Yahim Dobonsolo, Distrik Sentani, Kamis (9/2) kemarin.

Sementara itu Ketua Panitia Kegiatan dr Esterlina Ayomi yang juga Kepala Dinas kesehatan ini, mengungkapkan bahwa meski hari gerak PKK ke 33 ini jatuh pada tanggal 27 Desember 2005 lalu, namun tidak mengurangi makna dari kegiatan tersebut. Dikatakan bahwa dalam rangkaian peringatan hari gerak PKK ini, sejumlah kegiatan juga telah digelar, baik kegiatan intern, kegiatan sosial, maupun berbagai perlombaan kader PKK.

Dalam puncak peringatan hari gerak PKK yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dinas/instansi di lingkungan pemkab, jajaran distrik dan puskesmas yang ada di Kabuapten Jayapura, juga diwarnai dengan penyerahan hadiah berbagai lomba. Diantaranya, lomba asah trampil, lomba balita sehat, lomba dasawisma dan sejumlah kegiatan lainnya. (tri)

- Terbentuknya Tim Taman Posyandu yang terdiri dari dinas-dinas terkait, akademisi, LSM, PKK
- Replikasi model di beberapa lokasi
- Sosialisasi model Taman Posyandu yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk seluruh kabupaten di Papua
- Sebagai model revitalisasi Posyandu di Kabupaten Jayapura, Taman Posyandu akan dikembangkan untuk semua Posyandu.

Program ini sangat erat kaitannya dengan peran serta masyarakat. Oleh karena itu keberhasilan program ini sangat tergantung pada partisipasi masyarakat.

Peran Pemerintah untuk memberikan stimulan pada program ini juga menjadi hal penting. Kemauan pemerintah daerah pada pembangunan manusia dini dapat menjadi pemicu.

Beberapa contoh keberhasilan terlihat nyata adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia dini dan berujung pada peran serta masyarakat pada program ini.

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 18/06-2006

<p>Judul Proyek:</p> <p>Program Pencegahan HIV/AIDS untuk dalam dan luar sekolah di Papua</p>	<p>Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email):</p> <p>BPMD Provinsi Papua dengan didukung instansi terkait seperti BP3D, Dinas Pendidikan, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten, LSM</p>
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana):</p> <p>AusNatCom: Pemerintah Belanda</p>	<p>Mitra penanggung jawab:</p> <p>Tim KHPPIA (Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Anak)</p>

Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):

Program Pencegahan HIV/AIDS ini bertujuan:

Memberikan kontribusi pada pencegahan penularan HIV/AIDS di antara anak muda dan remaja di Papua

Memastikan anak muda dan remaja termasuk beresiko tinggi, mempunyai pengetahuan dan perilaku yang memadai untuk pencegahan HIV/AIDS

Program ini terselenggara di 5 kabupaten di Papua (Jayapura, Jayawijaya, Manokwari, Sorong, dan Biak).

Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan di dalam dan luar lingkungan sekolah termasuk di dalamnya remaja putus sekolah yang sulit mengakses informasi mengenai pencegahan HIV/AIDS.

Program yang dilaksanakan di dalam sekolah antara lain ; Pelatihan Keterampilan Hidup (Life Skill Education) bagi siswa siswi SMP yang tergabung dalam Student Club di sekolahnya masing masing yang diharapkan bisa menyebarkan informasi kepada sesama teman sekolahnya. Selain siswa, juga guru dan kepala sekolah mendapat pelatihan keterampilan hidup. Guru-guru ini diharapkan dapat menerapkan materi mengenai keterampilan hidup pencegahan HIV/AIDS serta metode mengajarnya. Selain siswa dan guru, orang tua yang tergabung dalam komite sekolah juga diberikan sensitisasi mengenai program ini sehingga diharapkan orang tua sebagai pembimbing di rumah dapat mendukung anak.

Program yang dilaksanakan untuk remaja luar sekolah adalah program pendidik sebaya (*Peer Educator*). Program ini bertujuan untuk menjangkau anak muda/remaja yang tidak mendapatkan kesempatan memperoleh informasi tentang HIV/AIDS dari sekolah karena tidak pernah bersekolah maupun karena putus sekolah. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan ini adalah pelatihan bagi para petugas PE, setelah dilatih diharapkan masing masing pendidik sebaya dapat melakukan outreach/penjangkauan dan diharapkan dapat menjangkat minimal 40 orang anak muda lainnya.

Ruang lingkup fokus / sektor yang didukung:

Program berfokus pada sektor Pendidikan dan HIV/AIDS

Lokasi/ruang lingkup wilayah:

Lima kabupaten yang ada di Papua (Jayapura, Jayawijaya, Biak, Sorong dan Manokwari) dan lima kabupaten di Irijaab;

Pola Pelaksanaan:

Bantuan teknis dan dana diberikan kepada Tim KHPPIA di lima kabupaten, kemudian bantuan dana akan diteruskan kepada instansi terkait seperti Dinas Pendidikan sebagai pelaksana program. Masing-masing instansi diwakili oleh seorang PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) dan PUMK (Pejabat Uang Muka Kegiatan). Setelah itu PJOK dan PUMK akan melaksanakan program dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, misalnya sekolah-sekolah menengah pertama atau juga dengan LSM.



PJOK dan PUMK inilah yang akan bertanggung jawab pada pembuatan proposal pengajuan kegiatan dan dana, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain PJOK dan PUMK ada juga dibentuk Tim Monitoring Kabupaten yang terdiri dari beberapa instansi untuk memonitor program-program yang berjalan di kabupatennya masing-masing, termasuk melakukan tinjauan lapangan. Selain Tim Monitoring Kabupaten, tim yang sama juga dibentuk di tingkat Provinsi untuk melakukan pemantauan ke lima kabupaten yang tergabung dengan program kerjasama ini.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Untuk program dalam sekolah sampai saat ini sudah 166 sekolah menengah pertama (SMP) di lima kabupaten di Papua sudah berhasil dijangkau untuk program-program tersebut diatas termasuk sekitar 30.000 siswa telah dijangkau dan 1200 orang tua yang tergabung dalam komite sekolah telah mendapat sensitisasi. Untuk kegiatan luar sekolah dengan program pendidik sebaya ada sekitar 130 pendidik sebaya yang sudah dilatih dan ada sekitar 1700 remaja luar sekolah yang berhasil dijangkau.

NB: informasi selanjutnya dapat diperoleh dari afarida@unicef.org

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 19/06-2006

Judul Proyek: Implementasi Rumah Aspirasi sebagai Infrastruktur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Papua	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): National Democratic Institute (NDI)
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): 1 juta US\$ (untuk 12 propinsi di Kawasan Timur Indonesia) Sumber Dana: DSF	Mitra penanggung jawab: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Berdasarkan MoU antara DPD dan Bank Dunia tanggal 22 Desember 2004)

Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):

Program “Implementasi Rumah Aspirasi sebagai Infrastruktur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Papua” merupakan bagian dari program yang sama yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 12 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia.

Fase pertama program ini, yaitu studi dan desain, telah diselesaikan pada Bulan Oktober 2005. Program Fase II berupa Implementasi Rumah Aspirasi akan dilaksanakan mulai Maret 2006 s/d Februari 2007.

Replikasi program juga sedang dipersiapkan untuk pembentukan Rumah Aspirasi di Kawasan Tengah dan Barat Indonesia.

Peran dan fungsi Rumah Aspirasi di tiap provinsi:

- Sebagai perpanjangan tangan atau fasilitas penghubung antara DPD dan stakeholder di daerah;
- Menjaring, menampung, memilah, verifikasi (investigasi), mengalokasikan atau distribusi aspirasi, melakukan kajian, formulasi aspirasi menjadi konsep akademik (konseptualisasi aspirasi), yang akan menjadi bahan bagi anggota DPD untuk diperjuangkan menjadi kebijakan (artikulasi aspirasi);
- Mensosialisasikan dan mempublikasikan hasil kerja anggota DPD;
- Memfasilitasi pertemuan dan koordinasi antara anggota DPD dengan pemerintah daerah dan legislatif daerah;
- Menjadi fasilitator dan mediator masyarakat dengan DPD;
- Melakukan program pemberdayaan dan pencerdasan rakyat, khususnya berkaitan dengan pendidikan politik dan demokratisasi;
- Sebagai “balai informasi dan komunikasi” masyarakat dengan DPD;

Komponen program:

Komponen program pada tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

1) Penyediaan sekretariat (gedung dan peralatan), 2) Rekrutmen staf, 3) Pelatihan staf, 4) Pengembangan rencana kerja dan jaringan informasi dan kepakaran, 5) Koordinasi jadwal kerja sesuai dengan agenda dan jadwal kerja DPD di tingkat nasional, 6) Kampanye rumah aspirasi, 6) Implementasi rencana kerja.

Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung:

Penguatan sistem lembaga perwakilan guna mendukung desentralisasi

Lokasi/ruang lingkup wilayah:

Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota, CSO, Lembaga Adat, Organisasi Perempuan, Organisasi agama, dll

Pola Pelaksanaan:

Pengumpulan aspirasi dan isu2 utama, konsultasi publik, penyediaan informasi agenda dan hasil2 persidangan DPD, pembuatan *policy papers*, pembuatan media informasi dan akuntabilitas publik anggota DPD

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Dukungan bagi DPD sangat penting dalam reformasi kelembagaan pemerintah dan juga terkait dengan dukungan bagi desentralisasi dan perjuangan aspirasi daerah dalam kebijakan nasional. Tidak seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yang merupakan kelembagaan politik dengan partai politik sebagai infrastrukturnya, DPD sebagai lembaga politik (parlemen) belum memiliki infrastruktur yang sudah mantap dan berkesinambungan di daerah. Program Rumah Aspirasi merupakan program yang digagas dan dimiliki oleh DPD dan mendapatkan dukungan dari kantor SOFEI. Implementasi program ini dimulai pada provinsi-provinsi di KTI. Replikasi pada Kawasan Tengah dan Barat Indonesia sedang dipersiapkan oleh DPD.

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 20/06-2006

<p>Judul Proyek:</p> <p>Jaringan Lembaga HIV/AIDS (<i>HIV/AIDS Institutional Linkages</i>)</p>	<p>Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email):</p> <p>Multidonor Support Office for Eastern Indonesia Gedung A.P. Pettarani No. 45 Makassar, Sulawesi Selatan Tel. 0411 425 284 / Fax. 0411 Email: info@bakti.org Kantor penghubung di Papua: Gedung BPID Papua, Jl. Samratungai No. 32 Jayapura</p> <p>Kantor World Bank Jakarta – Sektor Kesehatan bekerja sama dengan in partnership with KPA, NGOs, FBOs, lembaga PBB dan lembaga pelaksana internasional lainnya</p>
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana):</p> <p>Sumber Dana: Dutch Trust Fund (DTF) 70,000 USD</p>	<p>Mitra penanggung jawab:</p> <p>KPAD dan Dinas Kesehatan (masih akan dikonfirmasi)</p>
<p>Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):</p> <p>SofEI, berkaitan dengan sektor kesehatan dari Bank Dunia bermaksud untuk memperkuat kapasitas lembaga pemerintah dan non pemerintah melalui pembangunan kapasitas dan dukungan manajerial serta untuk meningkatkan dasar pembuktian bagi program HIV/AIDS di Papua melalui tinjauan dan sintesa ketersediaan informasi dan kajian pola kehidupan. Dengan melihat adanya beberapa donor yang membiayai program pengontrola HIV/AIDS di Papua, SofEI akan membangun hubungan dengan lembaga-lembaga tersebut, berupa kegiatan untuk mengumpulkan pengetahuan para dari lembaga donor yang diperoleh melalui proyek saat ini dan terdahulu yang meliputi HIV/AIDS. SofEI juga akan bekerja dengan Komisi Nasional dan Provinsi AIDS serta LSM, lembaga berbasis komunitas, jaringan HIV/AIDS serta lembaga-lembaga donor dalam hal koordinasi permasalahan program secara keseluruhan.</p> <p>Hal ini terutama meliputi: Meningkatkan harmonisasi donor dan pertukaran pengetahuan di kawasan Indonesia Timur.</p> <ul style="list-style-type: none">• Membangun jaringan dengan lembaga donor melalui komunikasi teratur dan partisipasi dalam kelompok kerja PBB untuk memperoleh pengetahuan donor yang melalui proyek saat ini dan terdahulu.	

- Mempromosikan pertukaran pengetahuan dengan menciptakan data dasar mengenai HIV/AIDS bagi fasilitas pertukaran pengetahuan (BAKTI) di Makasar.
- Mendukung pembentukan website bagi komisi HIV/AIDS di Provinsi Papua.
- Kolaborasi dengan koordinator komunikasi dalam bidang pembangunan komunitas di Jakarta guna membangun strategi komunikasi bagi HIV/AIDS di Indonesia Timur dengan menggunakan multi-media termasuk radio.

Kajian pola kehidupan mengenai HIV/AIDS di Papua yang dirancang oleh tim Kesehatan World Bank:

- Kompilasi informasi saat ini tentang sosial ekonomi, pola perilaku dan epidemiologi yang berkaitan dengan HIV/AIDS di Papua.
- Koordinasi dengan komisi AIDS di Papua dan dengan donor lainnya.
- Berhubungan dengan lembaga Indonesia yang akan melakukan survey.
- Membantu penyelenggaraan lokakarya serta pertemuan lainnya untuk menyebarluaskan evaluasi program dan hasil survey dengan para pemangku kepentingan di Papua.

Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung:

Kesehatan (HIV/AIDS)

Lokasi/ruang lingkup wilayah:

Papua (tidak ada spesifikasi lebih jauh pada saat ini)

Pola Pelaksanaan:

Fasilitasi pertemuan, penelitian dan pengelolaan pengetahuan, pembangunan kapasitas dan penyediaan dukungan manajemen

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Program dalam fase persiapan



Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar

Lembar Informasi Proyek LIP 21/06-2006

Judul Proyek: Pemetaan Kapasitas dan Membangun Kesadaran mengenai Penduduk Asli <i>(Indigeneous People's Capacity Mapping and Awareness Intiative)</i>	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Papua Jalan Jeruk Nipis No.117 Kotaraja-Jayapura P.O. Box 1114, Jayapura Telp: (0967) 581071; Fax: (0967) 581778 E-mail: ypmd@jayapura.wasantara.net.id
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): Rp. 1,184,649,375 Sumber Dana: DSF-Trust Fund Pemerintah Belanda	Mitra penanggung jawab: Program ini merupakan program kerja sama langsung dengan masyarakat dan difasilitasi oleh Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD) seperti yang dijelaskan di atas.
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): Tujuan Mengingat program ini dirancang berdasarkan pengalaman dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilakukan oleh berbagai stakeholder, inisiatif ini mengarah pada menguatnya inisiatif, partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan melalui kemitraan. Dengan demikian maka beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui program ini antara lain: Tujuan 1 Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan marga dalam menyusun profil masyarakat adat yang meliputi berbagai aspek dalam bentuk dokumen tertulis serta mampu mengelolah berbagai data tersebut untuk kepentingan pembangunan masyarakat adat Tujuan 2 Menguatnya peran dan fungsi marga dalam melakukan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka pembangunan di kampung terutama dalam ikut merencanakan dan mengambil keputusan-keputusan terkait pembangunan masyarakat Tujuan 3 Menguatnya proses desentralisasi dari pemerintah tingkat distrik ke tingkat kampung/desa melalui pelimpahan kewenangan dan keuangan dalam rangka mempercepat proses pembangunan kampung tanpa menghilangkan daya, inisiatif dan berbagai sistim sosial budaya sebagai jati diri masyarakat adat	

Luaran (Outputs)

Dari beberapa langkah dan kegiatan yang akan dilakukan maka out-put yang dapat dijadikan pembuktian dari pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Adanya daftar nama marga sebagai peserta program
2. Adanya daftar nama LSM yang akan terlibat dalam kegiatan assessmen dan implementasi lanjutan
3. Adanya materi sosialisasi dan dokumen informasi makro serta kesepakatan jadwal kegiatan lapangan
4. Adanya kriteria dan perangkat pemetaan kapasitas dan inisiatif dari penduduk asli
5. Adanya laporan hasil analisis kapasitas dan inisiatif keperdulian penduduk asli.
6. Adanya rekomendasi model partisipasi masyarakat adat (marga) dalam pembangunan.

Hasil (Outcomes)

1. Studi referensi memberi gambaran umum mengenai masyarakat adat yang menjadi sasaran fokus kajian. Dengan adanya studi tersebut memberikan kontribusi tentang keberadaan masyarakat asli di Papua yang dapat dikembangkan atau ditindak lanjuti melalui pengumpulan informasi secara keseluruhan.
2. Peta struktur adat dapat memberikan pemahaman atau penjelasan tentang struktur masyarakat adat serta definisi yang tepat tentang pengistillahan atau penyebutan tentang suku, klan, marga, fam, sebagai satuan komunikasi adat. Peta ini menggambarkan posisi satuan adat terkecil yang memiliki kewenangan atau otoritas atas sumber daya alam dan hak ulayat.
3. LSM yang terlibat dalam pemetaan kapasitas klan, selain dia sendiri memahami mengenai keberadaan klan dalam struktur adat, juga dapat membantu masyarakat mempromosikan kapasitas dan potensi yang dimiliki. Profil LSM menjadi referensi kepada mitra lain untuk melakukan kajian serupa.
4. Kriteria dan perangkat pemetaan dan promosi kapasitas klan dikembangkan dalam konteks masyarakat adat Papua. Alat tersebut menggambarkan teknik untuk melakukan penilaian terhadap masyarakat oleh masyarakat tentang apa yang dimiliki dan yang diharapkan. Materi ini mendorong masyarakat untuk melakukan kajian terhadap dirinya sendiri dan menjadikannya sebagai kapasitas atau kekuasaan dalam pembangunan berbasis masyarakat.
5. Hasil analisis pemetaan dan promosi kapasitas clan dapat menjadi sumber informasi dalam pembuatan kebijakan pembangunan yang menempatkan masyarakat adat sebagai pelaku dalam pembangunan. Pengembangan pola kemitraan antara masyarakat adat atau clan dan stakeholder lain dapat ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi dari hasil analisis.

Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung:	Lokasi/ruang lingkup wilayah:
Pembangunan Kapasitas Masyarakat Asli/Adat, Organisasi Masyarakat Sipil	Pemetaan kapasitas masyarakat adat di Papua akan dilakukan terhadap kurang lebih 21 clan di 7 wilayah budaya yaitu: wilayah budaya Tabi, Teluk Saireri, Doberay, Bomberay, La Pago, Me Pago dan Ha Anim. Clan yang akan berpartisipasi dalam progarm pemetaan akan diputuskan bersama di rapat koordinasi.

Pola Pelaksanaan:

Pelaksanaan program akan dilakukan oleh YPMD berdasarkan catatan konsep dan proposal yang telah disetujui. Jadwal dan penjelasan komponen program secara lebih terinci tersedia oleh YPMD jika diminta.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Dari berbagai proses dan pendekatan pembangunan yang terjadi selama ini, mengakibatkan rendahnya partisipasi dan inisiatif masyarakat, dan pada sisi lain tertutup akses dalam pengambilan keputusan untuk masa yang diinginkan masyarakat. Perilaku yang kemudian muncul adalah sikap instan pada sebagian masyarakat yang ingin segala sesuatu dengan mudah walaupun harus mengorbankan sumber dayanya seperti menjual tanah, dan sebagian lainnya hanya menunggu bantuan pemerintah yang setiap tahun mengerahkan sejumlah santiaus melalui instansi teknis yang telah menyiapkan proyek-proyek bantuan bagi masyarakat.

Untuk mengatasi masalah yang di atas iniatif ini bermaksud untuk berbagai keahlian dan ketrampilan yang terkait dengan aspek kelembagaan terutama dalam mendeskripsikan ulang tentang dirinya sendiri melalui profil masyarakat yang lebih akurat sebagai data based yang mampu di up-date setiap tahun. Dengan demikian diperlukan suatu pendekatan baru melalui konsep pemberdayaan masyarakat yang lebih menitikberatkan peran dan inisiatif masyarakat terutama dalam merencanakan dan memanfaatkan potensi dan sumber daya lainnya yang dimiliki dan dikuasai masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan dalam kerangka kemitraan dengan pemerintah dan berbagai pihak secara lebih bermartabat.

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 22/06-2006

Judul Proyek: Tinjauan terhadap Pembelanjaan Publik di Papua dan Program Harmonisasi Kapasitas (<i>Papua Public Expenditure Review and Capacity Harmonization Program or PEACH</i>) Phase II – Capacity Enhancement	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): - Pusat Studi Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih - Lembaga lain yang ditunjuk melalui proses tender
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana): 1 juta dollar Australia Sumber Dana: AusAID	Mitra penanggung jawab: BP3D Provinsi Papua (Berdasarkan MoU antara Pemerintah Provinsi Papua dan Support Office for Eastern Indonesia tanggal 1 April 2005)
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): Program Tahap II merupakan kelanjutan dari Program Tahap I (Analisa Pengeluaran Publik) yang telah selesai pada 10 Oktober 2005. Tujuan program: mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan milenium (MDGs) di Papua dan pelaksanaan otonomi khusus melalui peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam memahami dan mengelola keuangan publik secara efektif, efisien, partisipatif, bertanggungjawab dan transparan. Komponen program: 1. Diseminasi informasi keuangan publik di Papua 1.1 Distribusi pamphlet informasi keuangan publik 1.2 Diseminasi hasil PEA 2005 di kabupaten/kota lokasi studi kasus 2. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah 2.1 Pembentukan Jaringan Perguruan Tinggi Papua (JPTP) 2.2 Penyediaan dukungan teknis: (a) 6 Paket <i>Training of Trainers</i> ; (b) penempatan fasilitator pada tingkat provinsi untuk membuat penyesuaian peraturan di bidang keuangan daerah.	
Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung: Penguatan sistem dan peningkatan	Lokasi/ruang lingkup wilayah: Pemerintah Provinsi Papua dan Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota

kapasitas aparat pengelola keuangan daerah.	
<p>Pola Pelaksanaan:</p> <p>Penelitian, Seminar, drafting usulan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Lokakarya, TOT, Pendampingan</p>	
<p>Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:</p> <p>Pelaksanaan analisa pengeluaran publik (PEA) merupakan terobosan, dimana pertama kali instrumen ini dipakai secara partisipatif dan dilakukan pada tingkat regional/daerah. Sebelumnya PEA merupakan instrumen yang dikembangkan oleh World Bank pada tingkat negara.</p> <p>Pendekatan partisipatif yang dipakai dilakukan dengan pembagian peran sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perguruan Tinggi di Papua: memimpin proses analisa (pengumpulan data, analisa dan penulisan laporan) - Pemerintah Papua: menyediakan data dan <i>counterpart</i> - SOfEI/WB: menyediakan dukungan teknis dan logistik <p>Saat ini tiga perguruan tinggi di Papua (UNCEN, STIE Ottow&Geissler dan UNIPA) telah memiliki kapasitas untuk melaksanakan analisa pengeluaran publik.</p> <p>Pelaksanaan PEA di Papua telah menjadi contoh bagi provinsi lain. Saat ini sejumlah Gubernur dan Pemerintah Provinsi di KTI telah datang ke kantor SOFEI dan secara langsung meminta pelaksanaan program yang sama pada provinsinya. Antara lain: Pemprov Gorontalo, Pemprov Sulbar, Pemprov Sulut.</p>	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 23/06-2006

<p>Judul Proyek:</p> <p>Tinjauan dan Rancangan Ulang KDP di Papua (<i>KDP Review and Redesign for Papua</i>)</p>	<p>Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email):</p> <p>Multidonor Support Office for Eastern Indonesia Gedung A.P. Pettarani No. 45 Makassar, Sulawesi Selatan Tel. 0411 425 284 Fax. 0411 Email: info@bakti.org Liaison Office Kantor penghubung di Papua: Gedung BPID Papua, Jl. Samratungai No. 32 Jayapura</p>
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana):</p> <p>Tidak ditetapkan karena berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi bersama dengan PEMPROV Papua – BP3D Sumber Dana: Trust Fund Pemerintah Belanda</p>	<p>Mitra penanggung jawab:</p> <p>BP3D Provinsi Papua BPMD Provinsi Papua</p>

Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):

Program ini mendukung proses pemeriksaan kembali program KDP (Kecamatan Development Program) – atau yang disebut sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat (PPK). Sejauh ini, PPK sudah dilaksanakan di Papua dengan hasil yang cukup menggembirakan, dilihat dari perspektif pemberdayaan masyarakat yang terjadi melalui program ini. Namun karena pelaksanaan program selama ini dibawah manajemen pusat, dengan indikator yang ditetapkan secara nasional, maka pelaksanaan program dari sisi jadwal dan sumber daya yang diberikan, seolah-olah tertinggal dibandingkan wilayah Indonesia lainnya.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meneliti kembali efektivitas program PPK selama ini dan untuk memanfaatkan masukan yang diperoleh dari proses ini untuk mengembangkan program sejenis yang khusus dirancang sesuai dengan kondisi dan indikator pencapaian yang tepat bagi Papua. Program ini merupakan inisiatif Pemprov Papua yang didukung oleh kantor SOFEI (Pendukung Multidonor untuk Kawasan Timur Indonesia)

Pola Pelaksanaan:

Penelitian, Seminar dan Lokakarya untuk mempersiapkan konsep yang sesuai dengan kondisi wilayah di Papua

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Kegiatan ini dilaksanakan selama tahun 2006 sambil pelaksanaan program PPK saat ini diselesaikan. Banyak pelajaran yang sudah diperoleh dari program PPK pada saat ini yang sangat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pemberdayaan masyarakat di Papua. Pelajaran paling berharga adalah bahwa rancangan program apapun bagi Papua tidak dapat dikembangkan dengan pola sentralistik yang tidak memahami kondisi khusus di Papua. Kegiatan dimaksudkan untuk mencatat secara eksplisit semua pelajaran yang diperoleh melalui pelaksanaan PPK saat ini maupun pengalaman pemberdayaan masyarakat lainnya, dan menggabungkan pelajaran-pelajaran tersebut dalam dokumen rancangan program pemerintahan Provinsi Papua.

Program Pembangunan Papua



Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar

Lembar Informasi Proyek LIP 24/06-2006

Judul Proyek: Program Pioneer Listrik Masuk Desa <i>(Papua Rural Electrification Pilot Program)</i>	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): Multidonor Support Office for Eastern Indonesia Gedung A.P. Pettarani No. 45 Makassar, Sulawesi Selatan Tel. 0411 425 284 Fax. 0411 Email: info@bakti.org Liaison Office Kantor penghubung di Papua: Gedung BPID Papua, Jl. Sam Ratulangi No. 32 Jayapura
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): Sumber Dana: Trust Fund Pemerintah Belanda	Mitra penanggung jawab: PEMKAB Pegunungan Bintang

Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):

Program ini bertujuan untuk mengembangkan pola untuk menghadirkan fasilitas pembangkit listrik bagi masyarakat yang ramah lingkungan dan dapat dipertahankan oleh masyarakat. Keterbatasan jangkauan PLN pada daerah-daerah terpencil mengakibatkan ketergantungan masyarakat pada pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak. Hal ini sangat tidak memadai bagi masyarakat yang tidak saja dihadapkan dengan kenaikan tarif bahan bakar, tetapi juga biaya transportasi yang sangat tinggi. Pada sisi lain, adanya listrik dapat meningkatkan daya dan upaya masyarakat dari berbagai sisi, mulai dari perspektif keamanan sampai dengan pendidikan dan usaha ekonomi produktif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tujuan kegiatan ini adalah untuk meneliti sejauh mana keberadaan fasilitas pembangkit listrik tenaga air yang dikelola oleh masyarakat bekerjasama dengan pemerintah, dapat dilaksanakan pada wilayah-wilayah yang sangat terpencil.

Hasil kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa penerapan teknologi tepat guna yang dipadukan dengan proses peningkatan kapasitas masyarakat, dapat dijalankan dengan baik di daerah yang terpencil.

Program ini merupakan inisiatif PEMKAB Pegunungan Bintang berdasarkan surat permintaan dari Bupati Pegunungan Bintang yang ditembuskan kepada BP3D dan didukung oleh kantor SOFEI (Pendukung Multidonor untuk Kawasan Timur Indonesia).

Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung:

Pemberdayaan Masyarakat
Listrik Pedesaan

Lokasi/ruang lingkup wilayah:
Kabupaten Pegunungan Bintang**Pola Pelaksanaan:**

Survei lokasi, pemberdayaan masyarakat, instalasi perlengkapan, pengembangan kelembagaan lokal

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Program ini dalam persiapan akhir untuk dilaksanakan pada tahun 2006 ini. Survei sudah dilaksanakan dan sudah diperoleh laporan kelayakan lokasi sesuai dengan penetapan lokasi oleh Kabupaten Pegunungan Bintang



Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar

Lembar Informasi Proyek LIP 25/06-2006

Judul Proyek: Dukungan WHO terhadap Provinsi Papua (<i>WHO support to Papua Province</i>)	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): SSA WHO Papua Dinas Kesehatan Provinsi Papua Jl.Abe-Kotaraja Telp : 0967 588 024 Fax : 0967 588 024 Email : irawan_chs@yahoo.com Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggand dana):	Mitra penanggung jawab:
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): 1) Dukungan teknis terhadap Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten dalam menangani program TB, HIV/AIDs dan malaria, juga penyakit endemis setempat. 2) Dukungan teknis terhadap Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten dalam menangani program MCH. 3) Dukungan pelaksanaan kegiatan imunisasi dengan menyediakan anggaran pelaksanaan dan dukungan teknis.	
Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung: Sektor kesehatan	Lokasi/ruang lingkup wilayah: Provinsi Papua dan IJB, di seluruh Kabupaten
Pola Pelaksanaan: Penempatan tiga konsultan di provinsi Jayapura	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 26/06-2006

Judul Proyek: Literacy	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL KARTIDAYA P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Jakarta Tel. 593 971 Fax. 593 974 Tel./Fax 573 337 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana): Dana Otsus Oikonomos Foundation CIDA UNDP	Mitra penanggung jawab: Departemen Pendidikan Basional Dinas P&P Provinsi Papua-Bidang PLS
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): Menunjang kegiatan pemberaksaraan fasilitator SIL pada 10 kelompok bahasa. Kegiatan pemberaksaraan termasuk baca-tulis orang dewasa, pengadaan kurikulum abjad dan Muatan Lokal untuk SD kelas 1-6. Kurikulum tambahan termasuk buku dasar menghitung, Kamus Bergambar, seri Buku Penyuluhan Kesehatan serta teknologi tepat guna.	
Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung: Pembinaan program keaksaraan di 10 kelompok bahasa	Lokasi/ruang lingkup wilayah: Kabupaten Jayapura, Yapen, Mulia, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Sorong Selatan.
Pola Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none">• Mengadakan lokakarya pembuatan kurikulum berbahasa daerah• Mengadakan lokakarya penulisan sastra bahasa daerah• Lokakarya pelatihan tutor dan koordinator untuk program baca-tulis orang dewasa• Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)• Menunjang kegiatan pemberaksaraan tim fasilitator SIL• Pembinaan tutor dan koordinator melalui kursus penyegaran dan mentoring• Evaluasi program• Lokakarya pelatihan guru SD untuk sosialisasi kurikulum Mulok dwibahasa• Penggandaan kurikulum	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan: Orang dewasa yang lulus dari program baca-tulis dapat melanjutkan pendidikan melalui program Paket kesetaraan. Warga yang sekarang menjadi melek huruf, kini lebih percaya diri untuk terlibat dalam kehidupan sosial-ekonomi.	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 27/06-2006

Judul Proyek: Survey Bahasa-bahasa Daerah di Papua	Instansi Pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL KARTIDAYA P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Jakarta Tel. 593 971 Fax. 593 974 Tel./Fax 573 337 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana) Sumbangan Pribadi	Mitra Penanggung Jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Kesejahteraan Sosial
Deskripsi naratif dari proyek (tujuan dan aktifitas) Untuk menentukan situasi bahasa tertentu yang ada saat ini dan melakukan penelitian awal terhadap dinamika sosiolinguistik penutur bahasa tertentu. Pemetaan kembali batas-batas bahasa dan pendokumentasi bahasa-bahasa di Papua.	
Ruang lingkup fokus /sector yang didukung: Survei	Lokasi/ruang lingkup wilayah: Daerah Pantai Selatan dan Utara Papua
Pola Pelaksanaan: Penarikan daftar kosakata dan wawancara formal dan informal tentang situasi bahasa serta gambaran umum terbaru yang berhubungan dengan wilayah bahasa tertentu.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan: Dengan adanya survei bahasa daerah maka perencanaan program dan penempatan tim SIL di tiap lokasi menjadi lebih mudah, terarah dan sesuai kebutuhan.	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar

Lembar Informasi Proyek LIP 28/06-2006



Judul Proyek: Pusat Pelatihan SIL Papua (Papua Training Center)	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana): Rp. 2 milyar – hasil penjualan kompleks kantor SIL di Abepura	Mitra penanggung jawab: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DINAS PENDIDIKAN & PENGAJARAN DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): <p>SIL International, sebagai mitra pemerintah memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis bahasa daerah. Kegiatan-kegiatan pengembangan ini dilaksanakan melalui bidang-bidang teknis yaitu, survei, literasi, pengembangan masyarakat, kesehatan, komputer, media non-cetak, dan pemberdayaan alih bahasa daerah di bidang linguistik (ilmu bahasa). Selain dengan berbagai departemen pemerintah, SIL juga bekerja sama dengan yayasan mitra kerja lokal, antara lain: Yayasan Jasa Aviastri Indonesia (YAJASTRI); Yayasan Betania Indonesia (YBI); Yayasan Pelayanan Antarbudaya; Yayasan Karunia Bhakti Budaya (Kartidaya); Yayasan Penginjilan dan Persekutuan Masieray (YPPM).</p> <p>Terdapat 271 bahasa di Provinsi Papua, 269 bahasa yang hidup dalam arti digunakan oleh penuturnya, satu bahasa di ambang kepunahan dan satu bahasa yang telah punah.</p> <p>Sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk memperlengkapi Putra Daerah untuk mengembangkan komunitas terpencil di Provinsi Papua dengan keahlian pada bidang-bidang teknis tersebut di atas yang dianggap sangat penting dalam komunikasi lintas budaya antara komunitas mereka dengan dunia luar.</p>	
Ruang lingkup fokus / sektor yang didukung: Survei bahasa Literasi Pengembangan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Komputer Media Tepat Guna (Appropriate Media Services) Pengembangan Tenaga Alih Bahasa Daerah (Mother Tongue Translators)	Lokasi/ruang lingkup wilayah: Kab. Jayapura Kab. Sarmi Kab. Pegunungan Bintang Kab. Yahukimo Kab. Jayawijaya Kab. Boven Digoel Kab. Mapi Kab. Sorong Selatan Kab. Nabire Kab. Manokwari

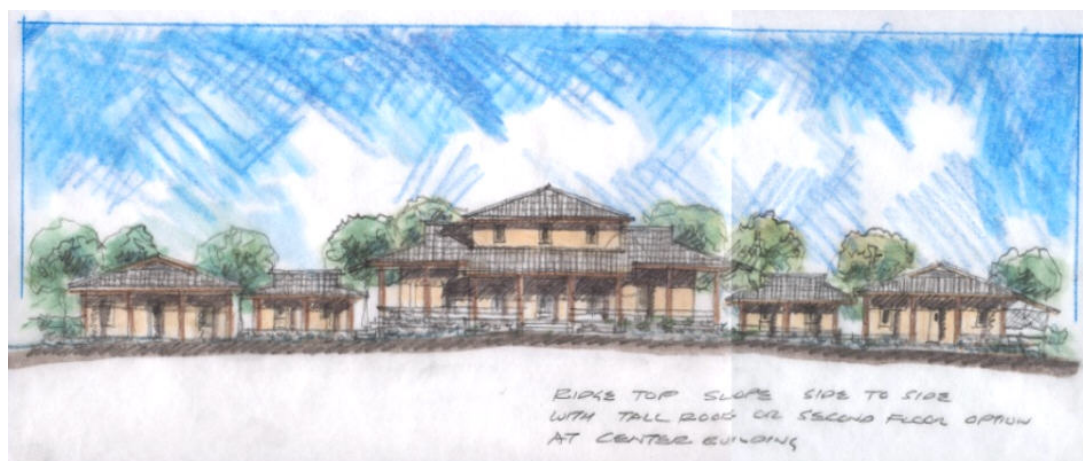
Pola Pelaksanaan:

Diharapkan pelatihan/pendidikan non-formal yang disediakan akan dikembangkan dan diterapkan di masa mendatang sebagai berikut:

- Pelatihan dalam bidang teknik-teknik survei, menganalisa bahasa, komunikasi lintas budaya dan prinsip-prinsip dasar penerjemahan.
- Kursus Bahasa Inggris.
- Pelatihan komputer.
- Pelatihan dalam bidang kesehatan masyarakat.
- Pelatihan dalam bidang literasi (pemberantasan tuna aksara)
- Pelatihan dalam bidang pengembangan masyarakat.
- Pelatihan dalam bidang media non-cetak (Appropriate Media Services)

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Proyek pengembangan masyarakat dengan pendekatan melalui bahasa dan budaya besar kemungkinannya untuk berhasil dan terus berlanjut secara swadaya masyarakat.

Site Plan - Pusat Pelatihan

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 29/06-2006

Judul Proyek: Pengembangan Masyarakat (Community Development)	Instansi Pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana):	Mitra penanggung jawab: BADAN PEMBERDAYAAN DESA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): Membantu tim-tim bahasa dalam bidang pengembangan masyarakat bagi masyarakat lokal di setiap lokasi kerja. <ul style="list-style-type: none">- Pembuatan kolam ikan- Pelatihan Kesehatan- Pertanian- Peternakan- Memfasilitasi "learning that lasts" melatih orang untuk menjadi pelatih- Membantu para fasilitator pengembangan masyarakat SIL dalam kegiatan pembangunan masyarakat desa.- Sebagai nara sumber dalam pelatihan serta lokakarya yang berkaitan dengan Pengembangan Masyarakat bagi yayasan mitra kerja lokal.- Mengalihkan teknologi kepada tenaga Pengembang Masyarakat nasional pada lingkup kerja SIL.- Membantu masyarakat dengan program air bersih dan pembuatan tengki ferro-semen.	
Ruang lingkup fokus / sektor yang didukung: Community Development	Lokasi/cakupan wilayah: Lokasi kerja SIL International di Papua
Pola Pelaksanaan: Alih teknologi dalam setiap pelatihan yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, juga cara mengajar yang mudah dimengerti dengan mengajak interaksi dari para peserta dari lokasi-lokasi kerja. Melengkapi para pekerja fasilitator dengan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan: Dengan adanya training ini, sangat mendukung pekerjaan para peserta Kursus pelatihan dirancang sedemikian sehingga para peserta yang datang dari berbagai daerah di Papua dengan latar belakang, tingkat pendidikan yang berbeda dapat mengikuti kursus pada saat yang bersamaan.	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 30/06-2006

Judul Proyek: Computer Training	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana):	Mitra penanggung jawab: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Deskripsi naratif (tujuan dan aktifitas): <ul style="list-style-type: none">• Memberikan pelatihan dalam bidang computer termasuk diagnostik perangkat keras dan perbaikan.• Memberikan pelatihan dalam menggunakan program MS Windows• Memberikan pelatihan khusus perangkat lunak• Menganalisa data bahasa, jaringan dan maintenance	
Ruang lingkup/sector yang didukung: Literacy Community Development MTT	Lokasi/ ruang lingkup wilayah: Lokasi kerja SIL International di Papua
Pola pelaksanaan: Alih teknologi dalam setiap pelatihan yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, juga cara mengajar yang mudah dimengerti dengan mengajak interaksi dari para peserta.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan: Dengan adanya training ini, sangat mendukung pekerjaan para peserta. Kursus pelatihan dirancang sedemikian sehingga para peserta yang datang dari berbagai daerah di Papua dengan latar belakang, tingkat pendidikan yang berbeda dapat mengikuti kursus pada saat yang bersamaan.	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 31/06-2006

Judul Proyek: Mother-Tongue Translators Penerjemah Bahasa Ibu	Instansi Pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana):	Mitra penanggung jawab: DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktifitas): Melestarikan pusaka budaya dan bahasa daerah. Meningkatkan penggunaan bahasa daerah. Memberdayakan masyarakat untuk melek aksara dan dapat berpikir secara kritis, dengan memikirkan solusi untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan setempat. Kegiatan: Teknik-teknik dasar penerjemahan Lokakarya Penterjemah Lokakarya Penulis Lokakarya Pembuatan Kamus	
Ruang lingkup/sector yang didukung: Literacy Community Development	Lokasi/ruang lingkup wilayah: Lokasi kerja SIL International di Papua
Pola pelaksanaan: Agar masyarakat dapat mandiri. Pengalihan teknologi. Mempunyai ruangan dan fasilitas kerja tersedia di Pusat Pelatihan SIL.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 32/06-2006

Judul Proyek: Appropriate Media Services/ Pelayan Media Yang Sesuai	Intansi Pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org
Pendanaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): Bantuan seperangkat komputer, printer dan digital kamera serta meja komputer.	Lembaga pelaksana (mitra pemerintah): BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Deskripsi Narasi dari Proyek (tujuan dan aktifitas): Mengembangkan cara melatih masyarakat dalam berbagai bidang tanpa menggunakan media cetak. Media tepat guna seperti membaca cerita, buku gambar papan flannel, Powerpoint, film, kaset dan lain-lain. Mengembangkan bahan-bahan untuk menjangkau mereka yang masih tuna aksara agar mereka mendapatkan pelatihan dasar kesehatan dan pengembangan masyarakat. Hal ini akan memotivasi mereka untuk belajar membaca agar dapat meningkatkan keahlian serta pengetahuan mereka. Memberikan pelatihan untuk mengembangkan dan menggunakan sarana yang sesuai untuk mengajarkan teknik-teknik pengembangan masyarakat. Kegiatan: Merekam cerita-cerita pada kaset, maupun VCD. Merekam ulang pada VCD rekaman yang telah dibuat pada kaset agar dapat tahan lebih lama. Merekam lagu-lagu daerah.	
Ruang lingkup/sector yang didukung: Literacy Community Development	Lokasi/ruang lingkup wilayah: Lokasi Kerja SIL International di Papua
Pola pelaksanaan: Program ini baru berjalan beberapa bulan dengan melatih 2 orang (1 dari daerah Una & 1 dari daerah Walak), namun diharapkan akan melatih lebih banyak orang apabila memiliki prasarana yang lebih memadai. VCD – HIV/AIDS telah dibuat dalam Bhs. Kemtuk - Flu Burung / Avian Flu sudah tersedia namun sedang diterjemahkan kedalam berbagai bahasa daerah. - Diharapkan buku-buku kesehatan lain dapat direkam pada VCD seperti Malaria, Demam, TBC, Lalat dll.	

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

VCD mengenai HIV/AIDS dalam bahasa Kemtuiik dan Una, mendapat sambutan yang baik...orang tua yang tidak dapat membaca dapat mendengar cerita mengenai HIV/AIDS, dan melihat gambar, begitupun anak-anak. Bagi mereka yang baru belajar membaca, dapat mengikuti ceritanya dalam buku bacaan kesehatan mereka.

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 33/06-2006

Judul proyek: Pengembangan Bahasa & Masyarakat Ambai	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org
Pendanaan (budget dan lembaga penyanggah dana): Sumbangan Pribadi	Instansi mitra (pemerintah): DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Deskripsi naratif dari proyek (tujuan dan aktifitas): Melestarikan pusaka budaya dan bahasa, membantu masyarakat agar mau beralih dari cara pandang menunggu dengan pasif tentang apa yang mereka belum pahami ke cara pandang untuk maju dan memperoleh ketrampilan agar mau menggunakan sumberdaya yang ada di sekitar mereka untuk membangun perekonomian rakyat. Kita telah membuat rangkaian program yang relatif kecil yang diawali dengan bidang-bidang terbatas seperti keaksaraan, penerjemahan dan pengembangan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan melatih para sukarelawan lokal dalam setiap program sebagai berikut:	
Ruang lingkup fokus / sector yang didukung: Literacy Community Development	Lokasi/cakupan wilayah: Kampung, Warironi, Waita, Randawaya, Dis. Yapen Timur, Kab. Yapen
Pola pelaksanaan: Kita telah membuat rangkaian program yang relatif kecil yang diawali dengan bidang-bidang terbatas seperti keaksaraan, penerjemahan dan pengembangan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan melatih para sukarelawan lokal dalam setiap program sebagai berikut: Lokakarya studi wacana Seminar mengenai pentingnya perpustakaan Membuat buku kerangka tentang kesehatan – AIDS, Program WC umum, Pelatihan Mulok, Pelatihan & Pembinaan penerjemah bahasa Ibu Pelatihan Mulok Buku kerangka biologi, kesehatan dalam bahasa Ambai.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan: Tantangan yang dihadapi adalah kurang adanya kerja sama dan partisipasi dari penduduk setempat dalam setiap program. Mereka sangat mengharapkan bantuan dalam bentuk uang, tetapi enggan mempertanggungjawabkan bantuan-bantuan tersebut. Agar suatu program bisa berhasil, maka masyarakat setempat harus merasa memiliki.	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 34/06-2006

Judul Proyek: Pengembangan Bahasa dan Masyarakat Auye	Lembaga Pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (budget dan lembaga penyanggah dana): Sumbangan Pribadi	Mitra pelaksana (pemerintah): DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Deskripsi naratif dari proyek (tujuan dan aktifitas): Memberdayakan masyarakat melalui keaksaraan agar dapat berpikir secara kritis untuk mencari solusi guna mengatasi berbagai masalah pembangunan setempat. Meningkatkan pembangunan prasarana masyarakat seperti pembangunan lapangan terbang di Dao dan tempat-tempat perintisan di wilayah lainnya.	
Ruang lingkup fokus / sektor yang didukung: Literacy Community Development	Lokasi /ruang lingkup wilayah: Kampung Aibore, Dis. Siriwo, Kab Nabire
Pola pelaksanaan: Pelaksanaan program antara lain pembuatan 4 kolam ikan, memberikan pelatihan cara berkebun dan pembagian bibit-bibit, pekerja sama dengan pemerintah alam pelayanan kesehatan, mendirikan asrama agar para murid SMP yang berasal dari suku Auye dapat melanjutkan studi mereka di ibu Kota Kabupaten.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan: Tantangan dalam mendukung pembangunan masyarakat Auye adalah kurangnya pendidikan. Hal ini juga disebabkan oleh luasnya daerah ini sehingga sangat sulit dijangkau. Untuk memecahkan masalah ini, maka kami akan memberikan pelatihan tentang keaksaraan bagi masyarakat Auye yang tidak dapat baca-tulis. Soal masalah transportasi, maka harus menggunakan jasa penerbangan MAF. Bantuan dana dari pihak luar akan sangat bermanfaat bagi para penduduk jika bantuan itu datang langsung dari pihak pemerintah serta keterlibatan langsung masyarakat, instansi terkait yang bekerja sama dengan kami.	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 35/06-2006

Judul Proyek: Pengembangan Bahasa dan Masyarakat Awyu	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): Sumbangan Pribadi	Mitra penanggung jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Deskripsi naratif dari proyek (tujuan dan aktifitas): Membangun masyarakat terisolir. Dengan meningkatkan tingkat kemelekaksanaan / pendidikan dasar dalam bahasa daerah. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan: Gizi, kebersihan dengan mengadakan lokakarya kesehatan dan pelatihan petugas kesehatan	
Ruang lingkup / sektor yang didukung: Community Development Health	Lokasi / ruang lingkup wilayah: Kampung Kotiak, Gayu Distrik Obaa, Kab. Mapi
Pola pelaksanaan: Lokakarya kesehatan diadakan di dua desa yaitu Taim dan Kotiak dan mengajarkan penduduk untuk mencegah penyakit malaria dan diare yang kerap mereka derita dan bagaimana cara mengobati penyakit tersebut dengan tepat karena merupakan kepercayaan masyarakat setempat bahwa penyakit berasal dari kutukan seseorang.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan: Proyek ini lebih rumit dibandingkan proyek kami yang lain di Papua. Ini disebabkan oleh karena sebagian besar masyarakat lokal belum memiliki konsep hidup "bermasyarakat". Program-program jangka pendek kurang berfungsi bagi kelompok masyarakat ini namun kami berupaya untuk menerapkan program-program yang berbasis pengadaan prasarana. Setelah mengadakan kegiatan tersebut di atas, maka hasil yang kita lihat adalah sikap positif terhadap pengobatan, penderita penyakit kulit (kaskado) berkurang karena sejumlah penderita telah diberi pengobatan. Para penduduk desa telah mengubah cara pandang mereka mengenai penyakit dan kematian. Secara perlahan cara pandang mereka didasarkan pada kebenaran. Masyarakat setempat sekarangpun sadar perlunya hidup bermasyarakat, dan sudah mulai bekerja sama untuk kepentingan umum dan secara sangat perlahan sedang belajar untuk saling menolong. Masyarakat setempat sangat dipengaruhi oleh usaha kayu gaharu, oleh karena itu penduduk setempat tidak mau melakukan pekerjaan tanpa diberi upah walaupun demi kemajuan ataupun kepentingan lingkungan....hal ini merupakan tantangan terbesar yang kita hadapi.	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 36/06-2006

Judul Proyek: Pengembangan Bahasa serta masyarakat Bauzi	Lembaga pelaksana (termasuk alamat, telpon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): Dana Otsus- Rp. 5.820.000 (Honor Tutor)	Mitra pelaksana (lembaga pemerintah): DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Deskripsi naratif dari proyek (tujuan dan aktifitas): <ul style="list-style-type: none">• Melestarikan pusaka budaya dan bahasa daerah.• Meningkatkan penggunaan bahasa daerah.• Memberdayakan masyarakat untuk melek aksara dan dapat berpikir secara kritis, dengan memikirkan solusi untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan setempat.• Masyarakat yang sebagian peladang berpindah-pindah agar dapat mengubah sikap pasif masyarakat terhadap bantuan yang mereka terima. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none">• Keaksaraan• Pembuatan buku primer dalam bahasa Indonesia• Kursus kesehatan• Penyaluran obat-obatan	
Ruang lingkup/sector yang didukung: Literacy Community Development	Lokasi/ruang lingkup wilayah: Distrik Mamberamo Tengah Kab. Sarmi
Pola Pelaksanaan: Strategi kami adalah membuat rangkaian program yang relatif kecil dengan diawali dengan bidang-bidang terbatas seperti keaksaraan, penerjemahan dan pengembangan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan melatih para sukarelawan lokal dalam setiap program. Dengan demikian prakarsa masyarakat unguj terlibat dalam pembangunan bisa terus dikembangkan, dan tidak selalu mengharap bantuan orang lain.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan: Tantangan yang dihadapi adalah dana yang terbatas. Selain itu tidak adanya kesatuan antar desa dan sulitnya transportasi untuk mencapai daerah-daerah yang terisolasi menyebabkan kemiskinan berkepanjangan. Untuk memecahkan masalah ini, kami masih menggunakan uang pribadi, sedangkan masalah perpecahan antar desa kami mencoba untuk memberi penyuluhan dan minta bantuan pemerintah setempat. Masalah kemiskinan saat ini belum teratasi.	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar informasi Proyek LIP 37/06-2006

Judul Proyek: Pengembangan Bahasa & Masyarakat Edopi	Lembaga pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL INDONESIA P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org Yayasan Pengembangan Masyarakat Edopi Depan Hotel Ratna 1 Sentani
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana): Dana Otsus – Rp. 2.668.000.- (Honor Tutor)	Mitra penanggung jawab: DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Deskripsi Naratif dari proyek (tujuan dan aktifitas): <ul style="list-style-type: none">• Melestarikan pusaka budaya dan bahasa daerah.• Meningkatkan penggunaan bahasa daerah.• Memberdayakan masyarakat untuk melek aksara dan dapat berpikir secara kritis, dengan memikirkan solusi untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan setempat Kegiatan: Keaksaraan Pembuatan buku primer dalam bahasa daerah & bahasa Indonesia	
Ruang lingkup / sektor yang didukung: Literacy Community Development	Lokasi/ruang lingkup wilayah: Kampung Dofu, Distrik Fau, Kab. Puncak Jaya
Pola pelaksanaan: Strategi kami adalah membuat rangkaian program yang relatif kecil dengan diawali dengan bidang-bidang terbatas seperti keaksaraan, penerjemahan dan pengembangan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan melatih para sukarelawan lokal dalam setiap program. Dengan demikian prakarsa masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan bisa terus dikembangkan, dan tidak selalu mengharap bantuan orang lain.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 38/06-2006

Judul Proyek: PEMBUATAN MULOK KEMTUIK	Instansi Pelaksana (termasuk alamat telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): CIDA - \$2,241 PEMPROV – Rp. 614.000.000.- Untuk program Kemptuik & Isirawa Private funds	Mitra penanggung jawab: DINAS PENDIDIKAN & PENGAJARAN
Deskripsi naratif dari Proyek (tujuan dan aktifitas): <ul style="list-style-type: none">• Melestarikan pusaka budaya dan bahasa daerah.• Meningkatkan penggunaan bahasa daerah.• Pemberantasan Tuna aksara Kegiatan: <ul style="list-style-type: none">• Pembuatan serta koordinasi - Lokakarya pengembangan bahasa orang dewasa semi-melek huruf• Penerjemahan• Pelatihan Tutor• Penulisan serta penerbitan cerita-cerita• Membersiapkan bahan mulok• Program keaksaraan – untuk meningkatkan keaksaraan• Pembuatan kamus dalam bahasa lokal.	
Ruang lingkup / sektor yang didukung: Literacy	Lokasi/ ruang lingkup wilayah: Distrik Kemptuik Gresi & Kemptuik
Pola pelaksanaan: Adanya kesadaran dari masyarakat setempat bahwa pendidikan dapat meningkatkan kepercayaan diri juga menyadari akan potensi belajar membaca akan mendukung terlaksana program pembuatan Mulok. Untuk membuat bahan bacaan, maka kami harus mempelajari fonologi bahasa Kemptuik untuk dapat menetapkan ortografi, mempelajari tata bahasa agar dapat membuat teks tertulis dengan tetap. Bahan keaksaraan harus di tulis agar masyarakat setempat dapat membaca dalam bahasa mereka sendiri.	

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Dengan membaca masyarakat menyadari bahwa kesehatan, pendidikan dll sangat penting dan hal ini menimbulkan rasa tanggung jawab.
Secara umum semua kegiatan cukup menyenangkan dan tidak menemui hambatan yang berarti

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 39/06-2006

Judul Proyek: On going Ketengban Adult Literacy Program	Instansi Pelaksana (termasuk alamat telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL Yayasan Pengembangan Masyarakat Ketengban Jl. Ifar P.O. BOX 1, Sentani SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana): Dana Otsus – Rp. 99.121.000.- (honor tutor)	Mitra penanggung jawab: DINAS PENDIDIKAN & PENGAJARAN
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktifitas): Pemberaksaraan orang dewasa. Melestarikan bahasa	
Ruang lingkup / sektor yang didukung: Literacy / Pendidikan	Lokasi/ ruang lingkup wilayah: 27 Kampung, Distrik – Kiwirok, Oksibil, Okbibab, Borme Kab. Pegunungan Bintang.
Pola pelaksanaan: Terdapat 83 tutor yang mengajar rata-rata 15 orang per kelas . Diadakan Pelatihan Tutor dua kali setahun.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan: Telah ada koperasi Program Pemberantasan Buta Aksara sejak 1984 Membuat masyarakat berfikir secara kritis Telah membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan adanya kolam ikan, dan penjualan kacang tanah.	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 40/06-2006

Judul Proyek: Pengembangan Bahasa Kirikiri	Instansi Pelaksana (termasuk alamat telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL KARTIDAYA P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Jakarta Tel. 593 971 Fax. 593 974 Tel./Fax 573 337 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana): Sumbangan Pribadi	Mitra penanggung jawab: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktifitas): Melestarikan pusaka budaya dan bahasa Kiri-kiri yang jumlah penuturnya sekitar 200 orang. Kegiatan: Keaksaraan – tahap awal.	
Ruang lingkup / sektor yang didukung: Literacy Pengembangan masyarakat	Lokasi / ruang lingkup wilayah: Kampung Wahuka, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Waropen
Pola pelaksanaan: Untuk melestarikan bahasa Kirikiri agar generasi penerus dapat mengenal dan menggunakan bahasa daerah mereka. Kirikiri juga adalah bahasa nada Sedang merivisi buku bacaan. Telah menyelesaikan penelitian linguistik (fonologi) Telah membuat buku Angka Membuat buku cerita binatang. Mengadakan kegiatan untuk anak usia pra sekolah Memperbaiki lapangan terbang.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar

Lembar Informasi Proyek LIP 41/06-2006

Judul Proyek: Pengembangan Bahasa serta Masyarakat Korowai	Instansi Pelaksana (termasuk alamat telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL YAYASAN BETANIA INDONESIA P.O. BOX 1, P.O. BOX 1471 SENTANI 99352, PAPUA JAYAPURA 99018 Tel. 593 971 Fax. 593 974 Tel./Fax 573 337 mike_eastwood@sil.org resmela_nila@yahoo.com
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana): Sumbangan Pribadi Sumbangan materi dari BPMD	Mitra penanggung jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktifitas): Melestarikan pusaka budaya dan bahasa daerah melalui kegiatan awal keaksaraan. Memberdayakan masyarakat untuk melek aksara dan dapat berpikir secara kritis, dengan memikirkan solusi untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan setempat. Kegiatan: Keaksaraan Pembuatan buku kesehatan Penyaluran obat-obatan	
Ruang lingkup / sektor yang didukung: Literacy Community Development	Lokasi / ruang lingkup wilayah: Kampung Sinimburu, Distrik Bomokia Kab. Boven Digoel
Pola pelaksanaan: Mempelajari bahasa, serta kebudayaan masyarakat setempat guna menyusun suatu program keaksaraan tahap awal. Membantu masyarakat dengan penyaluran obat-obatan seadanya. Diharapkan ke depan pelatihan dapat diadakan secara khusus mengenai kesehatan ibu-bayi, gizi dan kebersihan (hygiene).	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan: Tantangan yang dihadapi adalah sulitnya transportasi untuk mencapai daerah-daerah yang terisolasi yang menyebabkan kemiskinan berkepanjangan, kurangnya fasilitas umum masyarakat. Untuk itu kami mencoba untuk memberi penyuluhan dan minta bantuan pemerintah setempat. Kami sedang dalam proses pembuatan lapangan terbang dengan bantuan masyarakat setempat. Suatu hal yang masih sangat dibutuhkan adalah SSB serta perijinannya agar terdapat sarana komunikasi dengan dunia luar. Ke depan diharapkan akan ada pelatihan untuk meningkatkan penghasilan dan SDM masyarakat setempat, serta mencari program-program yang cocok dan juga akan melibatkan kerja sama dengan pemerintah.	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 42/06-2006

Judul Proyek: Bahasa lau	Instansi Pelaksana (termasuk alamat telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL YAYASAN PENGIJILAN & PERSEKUTUAN MASIERAY P.O. BOX 1, Jl. Proyek Waena SENTANI 99352, PAPUA Papua Tel. 593 971 Fax. 593 974 Tel. 571 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana): Sumbangan Pribadi	Mitra penanggung jawab: DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktifitas): Melestarikan pusaka budaya dan bahasa daerah. Bahasa lau adalah suatu bahasa nada (tonal language) yang memiliki 9 nada. Hal tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar mempelajari bahasa dan budaya. Kegiatan: Keaksaraan Pembuatan buku primer dalam bahasa lau 1 seri yang terdiri dari 4 buku Buku Pengajaran Abjad Bernada (Tone Alphabet Book)	
Ruang lingkup / sektor yang didukung: Literacy	Lokasi / ruang lingkup wilayah: Distrik Mamberamo Tengah Kab. Sarmi
Pola pelaksanaan:	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 43/06-2006

Judul Proyek: Keaksaraan Bahasa Isirawa	Instansi Pelaksana (termasuk alamat telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana): CIDA - \$2,241 PEMPROV – Rp. 614.000.000.- Private funds (for both the Kemtuik & Isirawa projects)	Mitra penanggung jawab: DINAS PENDIDIKAN & PENGAJARAN
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktifitas): <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan masyarakat Isirawa secara holistik2. Melestarikan pusaka budaya dan bahasa daerah.3. Meningkatkan penggunaan bahasa daerah.4. Pemberantasan Tuna aksara <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lokakarya Tutor Muatan Lokal2. Pembentukan Perpustakaan desa3. Lokakarya pengalihan guna melatih penggunaan primer pengalihan.4. Merekam buku kerangka kesehatan ke dalam kaset & VCD5. Lokakarya kesehatan6. Lokakarya menulis	
Ruang lingkup / sektor yang didukung: Literacy	Lokasi / ruang lingkup wilayah: Distrik Sarmi & Pantai Barat
Pola pelaksanaan: Sejumlah lokakarya diadakan untuk meningkatkan penggunaan bahasa daerah di sekolah. Enam buku primer dirancang & diproduksi yang memperkenalkan ortografi Isirawa. Kegiatan lainnya dilakukan untuk meningkatkan keaksaraan.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan: Perpecehan antar penduduk Isirawa disebabkan oleh persaingan antara dua dialek yang ada...namun hal ini telah teratasi dengan dibentuknya suatu Komite keaksaraan serta mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dalam satu lokakarya dan rapat. Karena wilayah ini terletak di pesisir pantai, maka sangat sulit untuk dilalui oleh kapal motor atau jalan kaki. Untuk mengatasi hal ini, maka sebuah landasan pesawat terbang telah dibangun. Pendanaan yang terbatas sangat berpengaruh pada pelaksanaan program, untuk itu kami harus mencari pendanaan untuk program-program ini.	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 44/06-2006

Judul Proyek: Pengembangan Bahasa Mai Brat	Instansi Pelaksana (termasuk alamat telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL YAYASAN BETANIA INDONESIA P.O. BOX 1471 P.O. BOX 1, P.O. BOX 1471 SENTANI 99352, PAPUA JAYAPURA 99018 Tel. 593 971 Fax. 593 974 Tel./Fax 573 337 mike_eastwood@sil.org resmela_nila@yahoo.com
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana): Sumbangan Pribadi Oikonomos US \$ 4,000	Mitra penanggung jawab: DINAS PENDIDIKAN & PENGAJARAN
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktifitas): Melestarikan pusaka budaya dan bahasa Mai Brat. Meningkatkan penggunaan bahasa daerah melalui Paket Mulok yang telah dirancang secara khusus untuk anak Sekolah Dasar, agar generasi penerus terus menggunakan bahasa daerah. Kegiatan: Keaksaraan Penggunaan paket MULOK di SD Pelatihan Guru / Tutor	
Ruang lingkup / sektor yang didukung: Literacy / Pendidikan	Lokasi / ruang lingkup wilayah: Kambuaya, Dis. Ayamaru, Kab. Sorong Selatan
Pola pelaksanaan: Untuk melestarikan bahasa Mai Brat, agar generasi penerus dapat mengenal dan menggunakan bahasa daerah mereka, maka telah dirancang paket Muatan Lokal. 14 orang guru telah dilatih yang mengajar 753 murid di SD. 22 judul buku telah dicetak.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan: Dengan gebrakan ini, anak-anak dapat lebih menghargai dan bangga akan bahasa dan kebudayaan mereka. Masyarakat setempat pun rasa bangga dengan adanya bahan bacaan serta materi dalam bahasa daerah mereka.	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 45/06-2006

Judul Proyek: Pengembangan Bahasa Mpur	Instansi Pelaksana (termasuk alamat telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org YAYASAN BETANIA NDONESIA P.O. BOX 1471 JAYAPURA 99018 Tel./Fax 573 337 resmela_nila@yahoo.com
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana): Sumbangan Pribadi	Mitra penanggung jawab: DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktifitas): Melestarikan pusaka budaya dan bahasa daerah. Meningkatkan penggunaan bahasa daerah. Memberdayakan masyarakat untuk melek aksara dan dapat berpikir secara kritis, dengan memikirkan solusi untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan setempat Kegiatan: Keaksaraan Awal Penelitian Bahasa & Budaya	
Ruang lingkup / sektor yang didukung: Initial Literacy Penelitian Bahasa	Lokasi / ruang lingkup wilayah: Distrik Kebar, Kabupaten Manokwari
Pola pelaksanaan: Hidup dan bergaul dengan masyarakat setempat agar dapat diterima dan mempelajari bahasa serta adat-istiadat. Melakukan pendataan bahasa, menentukan ortografi atau abjad kemudian mulai menyusun buku-buku dalam bahasa Mpur.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 46/06-2006

Judul Proyek: Pengembangan Bahasa Tehit	Instansi Pelaksana (termasuk alamat telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org YAYASAN BETANIA INDONESIA P.O. BOX 1471 JAYAPURA 99018 Tel./Fax 573 337 resmela_nila@yahoo.com
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): Sumbangan Pribadi Oikonomos US \$ 7,200.	Mitra penanggung jawab: DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DINAS PENDIDIKAN & PENGAJARAN
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktifitas): Melestarikan pusaka budaya dan bahasa Tehit yang jumlah penuturnya sekitar 8,800 yang tersebar pada 22 kampung. Meningkatkan penggunaan bahasa daerah melalui Paket Mulok yang telah dirancang secara khusus untuk anak Sekolah Dasar, agar generasi penerus terus menggunakan bahasa daerah. Kegiatan: 1. Keaksaraan 2. Penggunaan paket MULOK di SD 3. Pelatihan Guru / Tutor	
Ruang lingkup / sektor yang didukung: Literacy / Pendidikan	Lokasi / ruang lingkup wilayah: Kampung Seremuk, Wayer dan Sawiat, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan
Pola pelaksanaan: Untuk melestarikan bahasa Tehit, agar generasi penerus dapat mengenal dan menggunakan bahasa daerah mereka, maka telah dirancang paket Muatan Lokal yang terdiri dari Seri Pengajaran Abjad untuk kelas I – III serta Buku-buku cerita dwi-bahasa bagi kelas IV-VI dan Buku Panduan Guru. Modul ini digunakan oleh sekitar 2.200 pelajar SD yang tersebar di wilayah ini. 38 orang guru serta 13 tutor telah dilatih untuk mengajarkan bahan Mulok ini.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan: Dengan gebrakan ini, anak-anak dapat lebih menghargai dan bangga akan bahasa dan kebudayaan mereka. Masyarakat setempat pun rasa bangga dengan adanya bahan bacaan serta materi dalam bahasa daerah mereka.	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 47/06-2006

Judul Proyek: Pengembangan Bahasa serta masyarakat Una	Instansi Pelaksana (termasuk alamat telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): Dana Otsus – Rp 4.211.000 (honor tutor)	Mitra penanggung jawab: DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktifitas): <ol style="list-style-type: none">1. Untuk mengembangkan masyarakat secara holistik;2. Melestarikan pusaka budaya dan bahasa daerah.3. Meningkatkan penggunaan bahasa daerah.4. Pemberantasan Tuna aksara5. Membantu masyarakat yang sebagian peladang berpindah tempat untuk mengubah sikap pasif masyarakat terhadap bantuan yang mereka terima. <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelatihan penerjemahan bahasa ibu2. Pembinaan penerjemah bahasa ibu3. Kelas keaksaraan4. Pelatihan tutor5. Penyuluhan pencegahan AIDS, penerbitan buku dan rekaman VCD.6. Memfasilitasi perawatan dan pengobatan bagi anak-anak yang mengalami gangguan otak.7. Bantuan untuk anak yang kurang mampu dan tinggal di asrama8. Pembangunan 1 jembatan gantung dan perawatannya.9. Pembangunan 1 gedung sekolah dengan 2 ruang kelas	
Ruang lingkup / sektor yang didukung: Literacy Community Development	Lokasi / ruang lingkup wilayah: Distrik Langda Bomela, Kab. Yahukimo
Pola pelaksanaan: Strategi kami adalah membuat rangkaian program yang relatif kecil yang diawali dengan bidang-bidang terbatas seperti keaksaraan, penerjemahan dan pengembangan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan melatih para sukarelawan lokal dalam setiap program. Dengan demikian prakarsa masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan bisa terus dikembangkan, dan tidak selalu mengharap bantuan orang lain.	

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Beberapa hal yang membuat pembangunan kurang berjalan baik antara lain kecemburuan dan sifat individualisme yang kuat sehingga menghambat penduduk untuk memajukan pembangunan, masyarakat mengambil tanggung jawab sendiri untuk membangun daerahnya sedangkan mereka belum mengerti konsep pembangunan. Akibatnya pembangunan tidak berjalan dengan baik dan tidak adanya kerja sama dari masyarakat setempat. Kami akan berusaha membangun hubungan dengan masyarakat dan menjelaskan pentingnya program-program ini. Kami akan mencari dan membuat program pembangunan masyarakat yang sangat dibutuhkan.

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 48/06-2006

Judul Proyek: Program Literasi Walak	Instansi Pelaksana (termasuk alamat telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL Yayasan Pelayanan Antarbudaya P.O Box 1, SENTANI 99352, Jl. Raya Sentani No. PAPUA PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 Tel. 593 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana): Dana Otsus – Rp. 173.777.400 (Honor Tutor & Papan Tulis)	Mitra penanggung jawab: DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktifitas): Melestarikan pusaka budaya dan bahasa daerah. Meningkatkan penggunaan bahasa daerah. Memberdayakan masyarakat untuk melek aksara dan dapat berpikir secara kritis dan memiliki motivasi untuk memajukan diri sendiri serta masyarakat sekitarnya. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none">• Keaksaraan• Pembuatan buku primer dwi bahasa serta alat peraga untuk bahan Muatan lokal.• Lokakarya Tutor• Evaluasi Tutor	
Ruang lingkup / sektor yang didukung: Literacy	Lokasi / ruang lingkup wilayah: Distrik Ilugwa Kab. Jayawijaya
Pola pelaksanaan: Kurikulum Muatan Lokal SD sudah ada dan Program Tuna Aksara Dewasa telah dijalankan sejak tahun 2000.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 49/06-2006

Judul Proyek: Wambon	Instansi Pelaksana (termasuk alamat telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana):	Mitra penanggung jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktifitas): Tujuan utama adalah untuk membuka keterisolasian masyarakat di daerah Wambon melalui pembangunan prasarana transportasi dan pengembangan masyarakat. Telah diadakan kegiatan antara lain, lokakarya pengembangan bahasa dan kepemimpinan.	
Ruang lingkup / sektor yang didukung: Community Development Kesehatan	Lokasi / ruang lingkup wilayah: Kampung Manggelum, Distrik Kouh, Waropko & Mandobo, Kab. Boven Digoel
Pola pelaksanaan: Guna mempelajari bahasa secara lebih intensif maka telah dikumpulkan daftar kata Wambon – Indonesia, sedang dipelajari sistem bunyi bahasa yang dihasilkan oleh bahasa setempat serta sistem pengejaan bahasa yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Selain itu juga telah diadakan lokakarya kepemimpinan di mana para guru dilatih untuk mempermudah pengajaran di sekolah dan para petugas kesehatan setempat juga dilatih dalam mengembangkan pola hidup sehat. Kamipun berusaha untuk mendukung dalam perbaikan prasarana transportasi, kesehatan, pendidikan serta ekonomi dengan membantu dengan pengadaan obat-obatan, membangun landasan pesawat terbang, dan memenuhi kebutuhan bidang kesehatan dengan penyediaan obat-obatan.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan: Untuk persediaan obat-obatan, Puskesmas lokal di Manggelum sudah lebih aktif daripada sebelumnya. Jumlah pasien yang berkonsultasi kepada petugas kesehatan dan tim konsultan meningkat hingga mencapai 300%. Setengah biaya dari pembangunan landasan pesawat terbang dikeluarkan oleh masyarakat setempat. Ini menunjukkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat setempat untuk memajukan kelompok bahasanya.	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 50/06-2006

Judul Proyek: Pengembangan Bahasa serta masyarakat Yale	Instansi Pelaksana (termasuk alamat telepon, fax dan email): SIL INTERNATIONAL P.O. BOX 1, SENTANI 99352, PAPUA Tel. 593 971 Fax. 593 974 mike_eastwood@sil.org
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana):	Mitra penanggung jawab: DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktifitas): <ul style="list-style-type: none">• Melestarikan pusaka budaya dan bahasa daerah.• Meningkatkan penggunaan bahasa daerah.• Memberdayakan masyarakat untuk melek aksara dan dapat berpikir secara kritis, dengan memikirkan solusi untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan setempat, apalagi dengan pemekaran kabupaten dan distrik. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none">• Pengenalan terhadap bahasa serta kebudayaan• Revisi buku primer yang ada.	
Ruang lingkup / sektor yang didukung: Literacy	Lokasi / ruang lingkup wilayah: Distrik Anggruk, Kab. Yahukimo
Pola pelaksanaan: Pelajari bahasa serta kebudayaan dengan tinggal di tengah masyarakat setempat. Revisi buku primer yang pernah dibuat agar sesuai dengan pengucapan dan lain-lain.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 51/06-2006

Judul Proyek: <i>Multi Stakeholder Forestry Programme/Program Kehutanan Multipihak</i>	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): DFID
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): US\$2,000,000 (untuk Papua)	Mitra penanggung jawab: Departmen Kehutanan (national & propinsi), LSM, Universitas, swasta
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): Untuk menyediakan input untuk pembangunan masyarakat disekitar hutan, restrukturisasi bidang kehutanan dan penguatan kapasitas nasional dalam proses internasional.	
Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung: Kehutanan	Lokasi/ruang lingkup wilayah: Seluruh Papua, Saat ini di 8 Kabupaten
Pola Pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none">1. mendukung pemetaan penggunaan tanah dan negosiasi/penetapan batas.2. mendukung penguatan ekonomu dengan CBFM.3. mendukung hokum dan analisis ekonomi.4. mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.	
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:	

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 52/06-2006

<p>Judul Proyek: Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau Kecamatan Development Program (KDP) dimulai sejak 1998 hingga sekarang.</p>	<p>Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): Direktorat Jenderal pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri</p>																
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana): Pembiayaan Program berasal dari alokasi APBN, dana hibah lembaga pemberi bantuan dan pinjaman dari Bank Dunia. Tahapan Proyek sudah memasuki tahap III B (Secara Nasional). Anggaran PPK (US\$ juta) per Desember 2005 total :</p> <table border="0"><tr><td>a. Bank Dunia (IBRD)</td><td>= 559,4</td></tr><tr><td>b. Bank Dunia (IDA)</td><td>= 333,5</td></tr><tr><td>c. Pemerintah Indonesia</td><td>= 281,9</td></tr><tr><td>d. Trust Fund Belanda</td><td>= 60,2</td></tr><tr><td>e. Trust Fund Jepang</td><td>= 4,5</td></tr><tr><td>f. Trust Fund untuk Aceh</td><td>= 64,7</td></tr><tr><td>g. Trust Fund lainnya</td><td>= 15,5</td></tr><tr><td>h. Trust Fund melalui konsultan</td><td>= 0,2</td></tr></table> <p>Jadi total Pendanaan 1.319,9 (angka nasional)</p>	a. Bank Dunia (IBRD)	= 559,4	b. Bank Dunia (IDA)	= 333,5	c. Pemerintah Indonesia	= 281,9	d. Trust Fund Belanda	= 60,2	e. Trust Fund Jepang	= 4,5	f. Trust Fund untuk Aceh	= 64,7	g. Trust Fund lainnya	= 15,5	h. Trust Fund melalui konsultan	= 0,2	<p>Mitra penanggung jawab:</p>
a. Bank Dunia (IBRD)	= 559,4																
b. Bank Dunia (IDA)	= 333,5																
c. Pemerintah Indonesia	= 281,9																
d. Trust Fund Belanda	= 60,2																
e. Trust Fund Jepang	= 4,5																
f. Trust Fund untuk Aceh	= 64,7																
g. Trust Fund lainnya	= 15,5																
h. Trust Fund melalui konsultan	= 0,2																
<p>Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): Program Pengembangan Kecamatan merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memperkuat institusi lokal dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. PPK dimulai pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis ekonomi dan perubahan politik di Indonesia. Pada saat ini PPK sudah memasuki Fase ketiga pelaksanaannya dan diharapkan akan berlanjut sampai dengan tahun 2008.</p> <p>PPK menyediakan dana bantuan sekitar Rp.500 juta hingga Rp.1 milyar secara langsung kepada kecamatan yang besarnya tergantung jumlah populasi yang ada.</p>																	

Masyarakat desa kemudian bersama-sama terlibat dalam perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dana tersebut sesuai kebutuhan pembangunan dan prioritas yang ditentukan.
PPK memusatkan kegiatannya pada masyarakat pedesaan Indonesia yang paling miskin.

Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung:

Sesuai dengan prinsip dari PPK masyarakat sendiri yang menentukan jenis kegiatannya (Sektor Peningkatan kapasitas, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, Simpan pinjam Kelompok perempuan dan lain-lain) secara terbuka dengan beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan.

Lokasi/ruang lingkup wilayah:

Secara nasional PPK telah dilaksanakan di 33 Provinsi, 440 Kabupaten, 5.255 Kecamatan, 69.557 Desa. Sedangkan di Provinsi Papua 70 Distrik dan di Irian Jaya Barat 32 Distrik sejak 1998 hingga 2005.

Pola Pelaksanaan:

PPK bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai tahapan sebagai berikut:

- Disminasi Informasi dan Sosialisasi PPK dilakukan dalam beberapa cara. Lokakarya diadakan ditingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan desa.
- Proses perencanaan partisipatif di tingkat masyarakat (kelompok-kelompok), ditingkat desa sampai tingkat kecamatan. Masyarakat memilih dua Fasilitator desa (perempuan dan laki-laki) untuk mendampingi selama proses kegiatan program berlangsung. Didampingi Fasilitator Desa masyarakat menentukan sendiri jenis kegiatan yang telah diusulkan dan ditentukan melalui kompetisi mulai di tingkat kelompok, desa hingga kecamatan.
- Seleksi di Tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan yang harus didanai. Forum dilaksanakan secara terbuka, bebas dan demokratis.
- Proses pencairan dana dilakukan tiga (3) tahap, tahap I 40%, tahap II 40% dan tahap ke III 20%.
- Pelaksanaan proyek dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan dan di dampingi oleh Fasilitator Kecamatan Teknis maupun Non Teknis.
- Akuntabilitas dan laporan perkembangan dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan selama dua kali dalam pertemuan di desa dan terakhir Tim harus melaporkan akhir kegiatannya bila selesai dan melakukan pertemuan serah terima secara terbuka kepada masyarakat dan kepada desa.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Hasil PPK pada saat ini:

1. Meningkatkan akses ke pasar, pusat kota, fasilitas pendidikan, kesehatan dan air bersih.
2. Terbentuknya kegiatan ekonomi baru melalui prasarana yang dibangun oleh PPK.
3. Penghematan biaya dalam jumlah yang signifikan dengan metode yang telah dilaksanakan di PPK dan terbukti hemat rata-rata 56% lebih murah dari pekerjaan sejenis yang dibangun oleh pemerintah maupun kontraktor.
4. Memperluas kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja baru dengan adanya PPK
5. Dampak signifikan terhadap kenaikan belanja rumah tangga pedesaan (Dari hasil studi terhadap kecamatan PPK menunjukkan adanya peningkatan belanja rumah tangga yang cukup besar dibanding dengan kecamatan non PPK.
6. Sasaran program yan berpihak kepada orang miskin (Seperti yang diindikasikan dari hasil studi ekonomi, bahwa PPK terbukti sukses dalam menentukan sasaran dan memberikan bantuan kepada kecamatan termiskin di Indonesia)
7. Meningkatkan kinerja pemerintahan lokal dengan pembentukan model perencanaan dan pembiayaan partisipatif.
8. Rendahnya tingkat korupsi. Audit Independen terhadap PPK yang dilaksanakan oleh Moores Rowland menemukan penyimpangan proyek desa kurang dari 1 %.

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 53/06-2006

Judul Proyek: WWF Sahul Region Program	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): Yayasan WWF Indonesia Dirjen PHKA. Jl. Raya Sentani No.1 Waena, Jayapura Telp: 0967-572204-5
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): US\$ 3,2 juta (2003-2006) WWF Family dan beberapa donor agency	Mitra penanggung jawab: PHKA, Balai Taman Nasional (Wasur & Teluk Cenderawasih) BKSDA-Papua I & II , Dinas Kehutanan Propinsi Papua dan Irian Jaya Barat , BPKH, Universitas (Uncen,USTJ & UNIPA), BPPK, BAPEDALDA-Propinsi/Kabupaten, local NGO's, BP3D (Propinsi Papua/IJbdan Kabupaten)

Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):

Dalam tiga tahun terakhir ini WWF di Papua melakukan perubahan pendekatan kegiatan dari “project based” ke program based” dengan menitik beratkan pada dua tema yaitu “Target Driven Program” atau TDP’s dan Ecoregion. Dari 6 TDP yang menjadi konsen keluarga besar WWF dunia yaitu Forest, Marine, Species, Freshwater, Climate Change and Toxic, maka secara keseluruhan di Indonesia WWF hanya mengadopsi 4 TDP’s masing-masing Forest, Marine, Species dan climate change. Khusus di Papua dalam mengimplemenatsikan kegiatan didasarkan atas 3 TDP’s masing-masing, Forest, Marine dan species, serta bekerja dalam skala yang lebih luas melalui pendekatan eoregion.

Beberapa wilayah prioritas kerja WWF di Papua berdasarkan pendekatan TDP’s maupun ekoregion antara lain :

Selatan Papua : TDP Forest di dalamnya juga mencakup TransFly Ecoregion

TN Lorentz : TDP Lorentz

Usulan suaka Margasatwa Jamursba Medi : TDP Forest dan Spesies yang juga mencakup Bismarck Solomon See Ecoregion

TN Teluk Cenderawasih : TDP Marine dan juga meliputi Bismarck Solomon See Ecoregion

Jayapura : TDP Forest

Vogelkop : TDP Forest dan Vogelkop Ecoregion (tetapi programnya telah berakhir pada January 06).

Fokus wilayah kerja WWF saat ini tidak saja di dalam kawasan konservasi seperti TN Lorentz, TN Wasur, TN Teluk Cenderawasih, usulan suaka margsatwa Jamursba Medi, tetapi juga berada di luar kawasan konservasi terutama berkaitan dengan isu pengelolaan hutan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Selain bekerja menangani isu-isu konservasi, WWF juga memberikan perhatian terhadap upaya mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan terhadap daerah aliran sungai, mendorong kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengembangan kapasitas bagi stakeholder melalui pelatihan, fasilitasi kunjungan silang dan mendukung program pemberdayaan masyarakat lokal.

Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung:

Program WWF terfokus pada pengelolaan kawasan konservasi dan mempromosikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengembangan kapasitas yang akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat local guna meningkatkan kesejahteraan mereke dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Lokasi/ruang lingkup wilayah:

Selatan Papua, meliputi TN Wasur DAS BIKUMA/Bian Kumbe Maro (Kabupaten Boven Digul, MAPI and Merauke.
TN Lorentz : meliputi kabupaten Yahukimo, Jayawijaya, Puncak Jaya, Mimika dan Asmat.
TN Teluk Cenderawasih : Kabupaten Nabire dan Kabupaten Teluk Wondama.
Usulan Suaka Margasatwa Jamursba Medi : Kabupaten Sorong.
Unurun Guay : Kabupaten Jayapura.

Pola Pelaksanaan:

Dalam mengimplementasi program WWF selalu berupaya untuk membangun kerjasama dengan para pihak, terutama unit pelaksana teknis dari departemen kehutanan (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua I/II dan Balai Taman Nasional) yang ada di Papua dan juga dinas teknis maupun Badan seperti Dinas Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, BP3D, Bapedalda dan perguruan tinggi. Selain itu juga membangun kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di tingkat local, regional, nasional dan internasional serta kelompok-kelompok masyarakat adat. Program yang akan diimplementasikan umumnya dibangun untuk menjawab upaya pelestarian sumber daya alam di Papua, pengelolaan kawasan-kawasan konservasi, pemberdayaan kapasitas stakeholder dan pemberdayaan masyarakat yang dibangun secara partisipatif. Selain itu secara internal untuk memonitor implementasi program maka WWF melakukan evaluasi secara internal maupun menggunakan independen evaluator.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

1. Surat Rekomendasi Dirjen PHKA yang menominasikan Taman Nasional Wasur sebagai Ramsar Site.
2. Membangun visi bersama pengelolaan Vogelkop dan prioritas keanekaragaman hayati di wilayah Vogelkop.
3. Kesepakatan secara tertulis antara PEMDA Kabupaten Sorong dan WWF untuk menggunakan hasil assessment prioritas keanekaragaman hayati di Vegolkop sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan tata ruang.
4. Penetapan wilayah perairan disekitar usulan SM Jamursba Medi sebagai “Kawasan Konservasi Laut Daerah” oleh PEMDA Kabupaten Sorong.
5. Membuat Visi pengelolaan bersama Bismarck Salomon See Ecoregion antara Indonesia, PNG dan Salomon.
6. Membentuk tim Fasilitasi penyusunan RPTN Teluk Cenderawasih yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama dan kabupaten Nabire.
7. Komitmen PT Agora untuk mengadopsi “step wise approach” dana pengelolaan hutan di wilayah selatan Papua.
8. Peta wilayah adat dari 3 konfederasi di wilayah pegunungan (Kabupaten Yahukimo)
9. Peta scenario prioritas “biodiversity” di TransFly Ecoregion (Indonesia site).
10. Analisis stakeholders
11. SK Bupati Sorong menetapkan Perairan dan hutan sekitar pantai Jamursba Medi sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah.
12. Pembentukan forum DAS BIKUMA (Bian Kumbe Maro)

Sumber informasi lain bisa dilihat di web: www.wwf.or.id

Program Pembangunan Papua

Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Luar



Lembar Informasi Proyek LIP 54/03-2006

Judul Proyek:

Pembangunan Perdamaian Positif

- Pelayanan Perlindungan
- Pendidikan Perdamaian Partisipatif



Diskusi PBI dengan topik "Peran perempuan dan adat istiadat" yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Jayapura.



Instansi pelaksana
(termasuk alamat, telepon,
fax dan email):



Peace Brigades
International -
Yayasan Bina Perdamaian
Internasional Indonesia

Perumnas IV, D7
Padang Bulan 99351
Jayapura
Tel: +62 967 584 583
Fax: +62 967 584 676
Email: pbi_past@yahoo.com

Jl. Bhayangkara, 48A
Wamena
Tel/Fax: +62 0969 32 816
Email:
pbi_wamena@yahoo.com

Pendidikan Perdamaian
Partisipatif
Perumahan Kota Raja Grand,
A21
Jayapura
Tel/Fax: +62 967 854 403
Email:
pbi_ppe_papua@yahoo.com

Project Coordinator
Celia Guilford
Tel: +1 204 825 2477
Fax: +1 775 242 5240
Email: pbiip@mts.net

In-Country Coordinator
Naomi Baird
Tel: +62 21 797 0915
Fax: +62 21 797 3702

Pendampingan perlindungan waktu pelaksanaan aksi anti kekerasan di kota Wamena.	Email: pbi_icc@yahoo.com Website: www.peacebrigades.org																																																
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggand dana):</p> <table border="1" data-bbox="248 394 1032 879"> <thead> <tr> <th data-bbox="248 394 743 428">Confirmed Donors - 2006</th> <th data-bbox="743 394 841 428">Papua</th> <th data-bbox="841 394 938 428">General</th> <th data-bbox="938 394 1032 428">PPE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="248 428 743 462">PBI Germany - Misereor '04-2006</td> <td data-bbox="743 428 841 462"></td> <td data-bbox="841 428 938 462"></td> <td data-bbox="938 428 1032 462">30,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 462 743 495">PBI Germany - BMZ</td> <td data-bbox="743 462 841 495">5,000</td> <td data-bbox="841 462 938 495"></td> <td data-bbox="938 462 1032 495"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 495 743 583">PBI Germany - Churches of Hessen-Nassau, Rheinland, Westfalen and the Unified Protestant Mission</td> <td data-bbox="743 495 841 583">18,000</td> <td data-bbox="841 495 938 583"></td> <td data-bbox="938 495 1032 583"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 583 743 617">PBI Germany - Diakonisches Werk</td> <td data-bbox="743 583 841 617"></td> <td data-bbox="841 583 938 617">22,780</td> <td data-bbox="938 583 1032 617"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 617 743 651">ICCO (Netherlands) '05-2007</td> <td data-bbox="743 617 841 651"></td> <td data-bbox="841 617 938 651">41,283</td> <td data-bbox="938 617 1032 651"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 651 743 684">PBI UK Sigrid Rausing Trust</td> <td data-bbox="743 651 841 684"></td> <td data-bbox="841 651 938 684"></td> <td data-bbox="938 651 1032 684">17,217</td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 684 743 718">British Embassy</td> <td data-bbox="743 684 841 718">25,000</td> <td data-bbox="841 684 938 718"></td> <td data-bbox="938 684 1032 718"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 718 743 751">PBI Canada - CIDA</td> <td data-bbox="743 718 841 751"></td> <td data-bbox="841 718 938 751">200,000</td> <td data-bbox="938 718 1032 751"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 751 743 785">PBI Canada - Rights and Democracy</td> <td data-bbox="743 751 841 785">15,000</td> <td data-bbox="841 751 938 785"></td> <td data-bbox="938 751 1032 785"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 785 743 819">PBI Country Groups</td> <td data-bbox="743 785 841 819"></td> <td data-bbox="841 785 938 819">21,850</td> <td data-bbox="938 785 1032 819"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="248 819 743 879">Total Confirmed</td> <td data-bbox="743 819 841 879">63,000</td> <td data-bbox="841 819 938 879">285,913</td> <td data-bbox="938 819 1032 879">47,217</td> </tr> </tbody> </table>	Confirmed Donors - 2006	Papua	General	PPE	PBI Germany - Misereor '04-2006			30,000	PBI Germany - BMZ	5,000			PBI Germany - Churches of Hessen-Nassau, Rheinland, Westfalen and the Unified Protestant Mission	18,000			PBI Germany - Diakonisches Werk		22,780		ICCO (Netherlands) '05-2007		41,283		PBI UK Sigrid Rausing Trust			17,217	British Embassy	25,000			PBI Canada - CIDA		200,000		PBI Canada - Rights and Democracy	15,000			PBI Country Groups		21,850		Total Confirmed	63,000	285,913	47,217	<p>Mitra penanggung jawab: Disponsori oleh Komnas HAM (Nasional Komisi untuk Hak Asasi Manusia) Status Yayasan disilakan oleh Departemen Hukum & HAM</p>
Confirmed Donors - 2006	Papua	General	PPE																																														
PBI Germany - Misereor '04-2006			30,000																																														
PBI Germany - BMZ	5,000																																																
PBI Germany - Churches of Hessen-Nassau, Rheinland, Westfalen and the Unified Protestant Mission	18,000																																																
PBI Germany - Diakonisches Werk		22,780																																															
ICCO (Netherlands) '05-2007		41,283																																															
PBI UK Sigrid Rausing Trust			17,217																																														
British Embassy	25,000																																																
PBI Canada - CIDA		200,000																																															
PBI Canada - Rights and Democracy	15,000																																																
PBI Country Groups		21,850																																															
Total Confirmed	63,000	285,913	47,217																																														

Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):

Perkenalan

Yayasan Bina Perdamaian Internasional Indonesia atau Peace Brigades International (PBI) adalah suatu organisasi internasional yang bekerja bagi transformasi konflik tanpa kekerasan. Pekerjaan PBI didasarkan prinsip-prinsip tanpa kekerasan, tidak berpihak, bersifat internasional, tidak mencampuri persoalan politik serta bekerja secara transparan.

Selama 25 tahun terakhir PBI telah memberikan dukungan fisik dan moral bagi kegiatan perdamaian di berbagai negara. Pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan mengirimkan sukarelawan internasional, berdasarkan undangan dari individu, organisasi atau pemerintah lokal. PBI menolak bekerja sama dengan lembaga ilegal maupun kelompok bersenjata.

Sejak tahun 1999, PBI bekerja di Indonesia atas undangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Wilayah kerja yang telah dicakup PBI sampai saat ini meliputi Timor Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Flores, Sulawesi, Papua dan Jakarta, dengan kantor yang bertempat di Jakarta, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam serta Jayapura dan Wamena, Papua. Kegiatan-kegiatan pokok PBI adalah Pendampingan Perlindungan Internasional dan Pendidikan Perdamaian Partisipatif.

PBI mendapatkan status legal sebagai Yayasan di Indonesia, dengan akta pendirian Yayasan No. C-110.HT.01.02. Th 2005, atas nama *Yayasan Bina Perdamaian Internasional Indonesia*.

Bagaimana PBI Bekerja

PBI selalu bertindak hanya berdasarkan undangan dari para individu atau organisasi lokal. PBI hanya akan bekerja bersama dengan individu atau organisasi klien (mitra) setelah permohonan untuk menjadi klien bagi pelayanan PBI diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak. Permohonan dinilai dilandaskan pada beberapa prinsip dasar termasuk: 1) penolakan terhadap penggunaan kekerasan, 2) komitmen terhadap pengembangan perdamaian, 3) bekerja secara legal dan resmi. PBI masih memberikan pelayanan-pelayanan kepada para mantan klien PBI maksimal sampai dengan setahun setelah kontrak klien tersebut habis.

Agar supaya pelaksanaan tugas PBI menjadi efisien dan efektif, PBI membina hubungan kerja yang baik dengan semua otoritas setempat baik sipil, kepolisian, maupun militer. Adanya jaringan yang kuat dengan segala otoritas yang bersangkutan merupakan unsur penting yang menunjang kemampuan PBI dalam menangkal dan mencegah kekerasan. Oleh karena itu, maka PBI senantiasa bekerja secara terbuka dan transparan serta menginformasikan otoritas yang bersangkutan mengenai segala kegiatan relevan yang dilakukan oleh PBI.

Amanat / Tujuan dari Proyek Indonesia

- Mendukung suasana damai bagi masyarakat sipil untuk terus berkarya dan berkembang
- Menciptakan dan mengembangkan model penyelesaian permasalahan tanpa kekerasan
- Membantu mengembangkan dialog sosial, politik dan rekonsiliasi
- Meningkatkan pemahaman secara luas mengenai situasi di Indonesia
- Memberdayakan segala lapisan masyarakat sipil, yang mana pada saat yang sama mengurangi kebutuhan keberadaan PBI

Kegiatan pokok PBI di Papua

- Mensosialisasikan pelayanan PBI kepada otoritas, calon klien, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan
- Memperkuat jaringan yang dapat mencegah kekerasan di Papua
- Menilai permohonan-permohonan untuk menjadi klien PBI yang sesuai
- Memberikan/menyediakan pelayanan perlindungan internasional bagi organisasi-organisasi atau individu-individu klien PBI yang bekerja di Papua
- Mempersiapkan dan melaksanakan pelatihan pendidikan perdamaian partisipatif
- Memfasilitasi diskusi-diskusi untuk mendukung penciptaan budaya perdamaian
- Pembukaan dua perpustakaan perdamaian
- Pemutaran film yang berkaitan dengan topik perdamaian
- Menilai kegiatan alternatif untuk pembangunan perdamaian.
- Menilai kebutuhan dan kecocokan penyediaan pelayanan-pelayanan PBI kepada aktor-aktor yang berada di Papua

	<p>Lokasi/ruang lingkup wilayah: Jayapura dan Abepura Wamena dan Jayawijaya Manokwari</p> <p>Kadang-kadang pelayanannya disediakan di daerah lain kalau permohonan diterima</p>
<p>Pola Pelaksanaan:</p> <p>Kerja Pembangunan Perdamaian Positif PBI di Indonesia Pendampingan Perlindungan PBI memberikan pelayanan perlindungan kepada 10 organisasi klien (mitra) di Banda Aceh, Jayapura, Wamena, Manokwari dan Jakarta. Pelayanan ini termasuk pendampingan perlindungan secara fisik di lapangan, di kota atau di kantor, panggilan telepon rutin, dan menjadi juru hubung pejabat-pejabat lokal dan regional. Di Papua, PBI bekerja bersama dengan mitra-mitra berikutnya: KontraS Papua (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dari Jayapura, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia) dari Jakarta, LP3BH (Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum) dari Manokwari dan Theo Hese gem (mitra individu) dari Wamena.</p> <p>Workshop-Workshop Perdamaian Bagian lain dari program unik PBI adalah penyelenggaraan workshop-workshop perdamaian dan pelatihan pendidikan perdamaian. PBI bekerja dengan fasilitator-fasilitator lokal untuk mengembangkan jaringan yang kuat serta kapasitas bagi resolusi konflik di antara organisasi-organisasi lokal, pejabat-pejabat sipil dan kelompok-kelompok agama. Workshop-workshop tersebut membuka jalan untuk menguatkan dan memberdayakan masyarakat sipil dengan cara kerja dengan metode-metode resolusi konflik lokal dan adat istiadat setempat. Workshop-workshop sebelumnya telah dilaksanakan di Flores tengah dan bagian timur Flores, Timor Barat, Aceh, Medan, Makassar, Jakarta dan Jayapura.</p> <p>Diskusi-diskusi Perdamaian PBI telah menyelenggarakan diskusi-diskusi perdamaian di setiap kantor tim lapangannya mengenai isu-isu seperti peran-peran perempuan dalam pembangunan perdamaian dan mekanisme lokal tradisional (adat) dalam menghadapi konflik. Diskusi-diskusi tersebut telah dihadiri oleh masyarakat sipil lokal, dan isinya ditentukan oleh para peserta dan fasilitator lokal dengan masukan dari anggota-anggota tim PBI. Diskusi-diskusi sejenisnya telah dimulai di Jayapura, Banda Aceh dan Wamena.</p> <p>Pertunjukan Film dan Perpustakaan Perdamaian PBI menyelenggarakan pertunjukan film yang berkaitan dengan topik perdamaian di setiap kantor tim lapangannya. Pertunjukan tersebut biasanya dilanjutkan dengan diskusi mengenai isu-isu yang dimukakan melalui filmnya. Tim Pendidikan Perdamaian Partisipatif di Jayapura dan Tim PBI di Wamena telah membuka perpustakaan perdamaian umum yang menyediakan pelbagai sumber bacaan dan audio visual tentang budaya damai untuk masyarakat.</p> <p>"Diskusi ini bisa membawa kita bersama untuk berpikir tentang pentingnya nilai tradisi-tradisi. Bagaimana tradisi-tradisi tersebut bisa digunakan dan dihormati. Bagaimana sumber-sumber masalah bisa diselesaikan melalui hukum-hukum tradisional. Saya harap PBI akan memberikan lebih banyak Pendidikan Perdamaian. Saya harap bahwa budaya perdamaian yang tradisional dari setiap daerah juga akan kembali bangkit." Ibu Mientje dari Universitas Cenderawasih dan anggota MRP.</p> <p>"Kehadiran PBI secara fisik dalam sidang pengadilan Hak-Hak Asasi Manusia di Makassar memberikan kami perasaan aman dan dukungan moral. Bagi kami, dan khususnya bagi para korban penyiksaan, kehadiran PBI menunjukkan kepada kami bahwa masyarakat internasional tidak sepenuhnya melupakan kami. Korban-korban tersebut sangat berterima kasih bahwa kalian (PBI) berada di pengadilan tersebut" Maya, PBHI, setelah pendampingan perlindungan</p> <p>"Karena kerja saya sebagai aktivis hak-hak asasi manusia, saya pernah diintimidasi, diteror dan ditahan. Saya pernah dievakuasi dalam pesawat muatan barang dan bahkan berpikir harus meninggalkan negara ini. Sejak PBI melakukan perlindungan kepada saya, saya merasa jauh lebih aman. Saya bisa bekerja dengan lebih percaya diri dan terbuka, saya tidak harus bersembunyi lagi." Matius Murib, KontraS Papua</p>	

Rencana PBI di Jayapura:

Tim PBI di Jayapura sudah bekerja di Papua selama dua tahun lebih, yaitu sejak bulan Maret 2004. PBI di Jayapura memberikan pendampingan perlindungan dan pelayanan perlindungan lainnya kepada mitra-mitra PBI. Pendampingan perlindungan dan pelayanan perlindungan lainnya telah diberikan kepada anggota-anggota KontraS Papua (dari Jayapura), PBHI (dari Jakarta) dan LP3BH (dari Manokwari) di Jayapura, Abepura, Wamena, Manokwari, Wasior dan Makassar. Supaya pelaksanaan tugas PBI efisien dan efektif, PBI menghendaki pembangunan hubungan kerja yang baik dengan semua otoritas setempat baik sipil, kepolisian, maupun militer. Adanya jaringan yang kuat dengan segala otoritas yang bersangkutan merupakan unsur yang penting terhadap kemampuan PBI menangkal dan mencegah kekerasan.

Selain program pelayanan perlindungan, Tim PBI di Jayapura juga melaksanakan program pendidikan perdamaian partisipatif. Tujuan pendidikan perdamaian partisipatif adalah mempromosikan penyelesaian konflik tanpa kekerasan, dan mempercepat proses pembangunan perdamaian melalui pemberdayaan masyarakat sipil dengan metode partisipatif. Metode tersebut berfokus pada pengalaman para peserta, ketrampilan dan kearifan lokal dan adat istiadat setempat. Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sukses di Jayapura adalah: pelatihan transformasi konflik dan diskusi perdamaian yang membangun inisiatif lokal dalam bentuk dialog antara komunitas setempat, pertunjukan film dan pembukaan perpustakaan yang menyediakan pelbagai sumber bacaan dan audio visual tentang budaya damai. Berdasarkan prinsip pembangunan kapasitas setempat, PBI bekerja sama fasilitator dan nara sumber lokal. Sejak bulan Mei 2006 adalah tim di Jayapura yang bekerja khususnya untuk pelaksanaan Program Pendidikan Perdamaian Partisipatif. Tim tersebut mengadakan perpustakaan, pelatihan transformasi konflik, diskusi perdamaian dan pemutaran film atas permintaan dari organisasi atau individu dari Jayapura maupun dari daerah lain.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Pertunjukan film dan diskusi perdamaian

Pada tanggal 9 Maret 2006 Tim Jayapura mengadakan pertunjukan film sebagai bagian dari program Pendidikan Perdamaian Partisipatif. 45 peserta dari LSM-LSM lokal, gereja-gereja, otoritas dari pemerintah lokal dan mahasiswa-mahasiswa ikut pemutaran film tentang peran perempuan dan adat istiadat di Selandia Baru yang dilanjutkan dengan diskusi. Pada tahun 2005 Tim Jayapura bersama fasilitator dan nara sumber lokal menyelenggarakan 6 diskusi perdamaian dengan topik peran perempuan dalam adat istiadat. Dengan diskusi-diskusi tersebut PBI membuka ruang untuk para peserta dari LSM, gereja, pemerintahan, kepolisian dan kaum mahasiswa sehingga kapasitas dan pengetahuan setempat tentang menciptakan Budaya Damai bisa saling ditukar (exchanged) dan dibangun.

Perpustakaan Perdamaian

Tim Jayapura memperluas perpustakaan perdamaian dengan buku-buku, laporan-laporan dan materi mengenai pembangunan perdamaian dan transformasi konflik secara damai. Selain itu juga ada media interaktif tentang aksi tanpa kekerasan dan topik lain yang berkaitan dengan perdamaian di Bahasa Indonesia dan di Bahasa Inggris.





Rencana PBI di Wamena

Menjelang akhir tahun 2004, penilaian kebutuhan dan kecocokan kehadiran PBI dilaksanakan selama empat hari di Wamena, dengan tujuan memahami konteks lokal di Wamena dan menilai keperluan PBI di sana. Berdasarkan jawaban yang sangat positif terhadap penilaian kebutuhan ini, PBI Proyek Indonesia mengambil keputusan untuk menempatkan tim sukarelawan di Wamena pada tahun 2005. Sejak bulan Juli 2005, tim PBI bekerja di Wamena. Kantor PBI di Wamena melaksanakan dua program, yaitu program Pelayanan Perlindungan termasuk Pendampingan Perlindungan Internasional dan Pendidikan Perdamaian Partisipatif. Pada khususnya, PBI akan berfokus pada program Pendidikan Perdamaian Partisipatif di Wamena serta melaksanakan pelbagai kegiatan serupa yang sudah dilakukan dengan sukses di Jayapura: pembukaan sebuah perpustakaan perdamaian yang menyediakan pelbagai sumber bacaan dan audio visual tentang budaya damai, pertunjukan film yang berkaitan dengan topik perdamaian, dan membangun inisiatif lokal dalam bentuk dialog antara komunitas setempat berkaitan dengan budaya damai dalam bentuk diskusi perdamaian. Berdasarkan prinsip pembangunan kapasitas lokal, PBI bekerja bersama organisasi partner setempat yang menaruh minat dan bergerak dalam bidang pembangunan perdamaian. Program Pendampingan Perlindungan Internasional sekarang dilaksanakan atas permohonan klien-klien PBI. Selain itu Tim PBI di Wamena sudah mensosialisasikan rencana PBI di kabupaten Jayawijaya dan kabupaten Yahukimo.



*Diskusi
Perdamaian*



*Pembukaan
Perpustakaan*

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Sejak kantor PBI di Wamena dibuka, seorang klien (mitra) baru untuk pelayanan perlindungan diterima dan disetujui, dua diskusi perdamaian dilaksanakan, perpustakaan perdamaian dibuka, film yang berkaitan dengan topik perdamaian diperlihatkan setiap dua minggu, dan empat field trips di luar kota Wamena untuk mensosialisasikan visi dan misi PBI di Papua dilaksanakan. Selain itu, tim di Wamena belajar banyak tentang tantangan dan keuntungan dari pekerjaan di Wamena.

Salah satu hal yang paling penting untuk aktivitas PBI di Wamena adalah bahwa PBI selalu bekerja secara transparan. Strategi itu membuka ruang antara semua pihak dan menjadi efektif untuk memperkembangkan kepercayaan.

Selain itu, field trips yang kami adakan membangun hubungan yang baik antara PBI dan komunitas-komunitas di keliling Wamena, serta memberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang yang jarang datang ke Wamena. Salah satu pengalaman yang paling dihargai oleh tim PBI adalah satu hari setelah kami mensosialisasikan PBI di desa, maka seorang kepala suku jalan kaki selama enam jam untuk mengunjungi kami di kantor. Dia ingin bertemu dengan anggota-anggota PBI secara langsung untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran PBI dan menyampaikan pengalamannya.

Pernyataan dari mitra lokal:

"Diskusi perdamaian PBI membuat saya mengerti hal-hal yang saya belum tahu sebelumnya: Adat harus ditulis, karena orang muda tidak begitu sadar tentang aturan-aturannya lagi. Di sini di Pegunungan, kalau seorang mau membantu korban kekerasan dalam rumah tangga, dia akan dicurigai berpihak untuk korban itu dan dilibatkan dalam konflik, apalagi kalau laki-laki. Jadi orang tidak mau mengambil resiko itu, dan hal tersebut merupakan salah satu alasan sulitnya mencari bantuan untuk korban-korban."

Pendeta Gerda Mofu, GKI, 15 May 2006

